



# **RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2023-2026**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 17 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2023-2026**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional bagi kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada, menyusun dan mensinergikan perencanaan program kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, bahwa Gubernur Sulawesi Barat termasuk yang akan melakukan pilkada sehingga mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode empat (4) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 3

RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Badan/Dinas/Sekretariat Daerah memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2026 dan menjadi

acuan...

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Badan/Dinas/Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 4

(1) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- e. Dinas Kesehatan Daerah;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
- h. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
- i. Dinas Sosial Daerah;
- j. Dinas Tenaga Kerja Daerah;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
- l. Dinas Ketahanan Pangan Daerah;
- m. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
- p. Dinas Perhubungan Daerah;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- s. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
- v. Dinas Pariwisata Daerah;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah;
- x. Dinas Perkebunan Daerah;
- y. Dinas Kehutanan Daerah;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;
- aa. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah;
- bb. Dinas Transmigrasi Daerah;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- jj. Badan Penghubung; dan
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

(2) RENSTRA...

- (2) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
  - h. BAB VIII PENUTUP.
- (3) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Strategis.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 27 Mei 2022  
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,



AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muhammad Idris', is written over the text of the Secretary of the Region of Sulawesi Barat.

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 17

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 ini dapat diselesaikan.

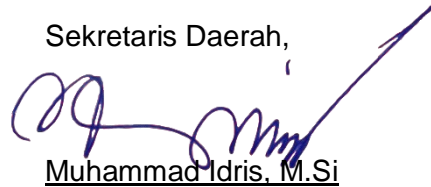
Dasar penyusunan Renstra Sekretariat Daerah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

Renstra ini berisi informasi rencana strategis 4 (empat) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Renstra ini, semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh jajaran pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Mamuju, 17 Maret 2022

Sekretaris Daerah,



Muhammad Idris, M.Si

Pangkat : Pembina Utama

NIP. : 19641115 199303 1 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH .....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah .....	6
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah .....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah .....	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah .....	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH .....	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah .....	32
3.2. Telaahan Program Pembangunan Daerah .....	36
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis .....	36
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	52
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	55
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	58
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN .....	59
BAB VIII. PENUTUP .....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Pendidikan ASN Lingkup Sekretariat Daerah .....	22
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	33
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah .....	51
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	54
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD .....	58

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran I. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- Lampiran II. Struktur Organisasi Staf Ahli Gubernur
- Lampiran III. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menjadi bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang merupakan unsur staf yang membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bahwa RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 akan berakhir, sehingga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026.

Untuk melaksanakan amanah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dimaksud, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026, dimana salah satu fungsinya adalah sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RPD merupakan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Perangkat Daerah (Renstra PD).

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat periode 2023-2026, maka disusunlah Rencana strategis Sekretariat Daerah (RENSTRA

SETDA) Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat Daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang.

Program RPD yang termasuk bidang urusan lingkup Sekretariat Daerah menjadi acuan dalam menyusun Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, hal ini untuk memastikan bahwa Program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam dokumen Renstra merupakan penjabaran RPD sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Penyusunan kegiatan juga memperhatikan kedudukan dalam urusan, proyeksi empat tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Renstra Sekretariat Daerah yang dirumuskan dapat terlaksana secara efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga secara optimal dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Renstra ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Sekretariat Daerah dan stakeholder lainnya dalam mewujudkan tujuan organisasi;
2. Menjadi pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Menjadi instrumen untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja organisasi;
5. Menjadi bahan penyusunan perencanaan untuk tahap selanjutnya, sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan program-program RPD sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah setiap tahunnya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat periode 2023-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

#### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

3.2. Telaahan Program Pembangunan Daerah

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Staf Ahli
  1. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik
  2. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
  3. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasi :
  1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
  2. Biro Hukum
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinasi :
  1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
  2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- e. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasi :
  1. Biro Organisasi; dan
  2. Biro Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut dapat dijelaskan tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

#### a. Sekretaris Daerah

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### b. Staf Ahli

1. Staf Ahli Gubernur terdiri atas :
  - a. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik
  - b. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
  - c. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia



2. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik, mempunyai tugas :
  - a. Memberikan pertimbangan dan saran dalam perumusan kebijakan kepada gubernur, wakil gubernur dan Sekretaris Daerah baik diminta ataupun tidak diminta sesuai dengan pembedangannya.
  - b. Dapat melakukan koordinasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada perangkat daerah sesuai dengan pembedangannya.
3. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas :
  - a. Memberikan pertimbangan dan saran dalam perumusan kebijakan kepada gubernur, wakil gubernur dan Sekretaris Daerah baik diminta ataupun tidak diminta sesuai dengan pembedangannya.
  - b. Dapat melakukan koordinasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada perangkat daerah sesuai dengan pembedangannya.
4. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :
  - a. Memberikan pertimbangan dan saran dalam perumusan kebijakan kepada gubernur, wakil gubernur dan Sekretaris Daerah baik diminta ataupun tidak diminta sesuai dengan pembedangannya.
  - b. Dapat melakukan koordinasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada perangkat daerah sesuai dengan pembedangannya.

**c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam penyusunan dan pengoordinasian kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
  - d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

**Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

- (1) Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.

- (2) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat;
  - b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat;
  - c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat;
  - d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat;
  - e. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait
  - f. pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

- a. Bagian Pemerintahan; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha.
  - (2) Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
    - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
    - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Pemerintahan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro: dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

### **Biro Hukum**

(1) Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

(2) Biro Hukum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Biro Hukum, terdiri atas:

- a. Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota;
  - b. Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III.
- Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
  - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (2) Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan bahan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.

Bagian Bantuan Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Bantuan Hukum dan HAM terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

**d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

- (1) Asisten Perekonomian dan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan daerah pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
  - b. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

**Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

- (1) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan.
- (2) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
  - b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;

- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan system akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan system informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ dan LPPD lingkup biro;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan pembinaan pegawai ASN.

### **Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

- (1) Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :

- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.

(2) Dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi dan Strategi Pengadaan Barang Dan Jasa; dan



b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Administrasi dan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
- d. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sectoral;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- h. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan renstra, renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Biro;
- j. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
- k. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- l. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- m. melaksanakan pembinaan pegawai ASN;
- n. melaksanakan review perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

**e. Asisten Administrasi Umum**

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi dan umum.

(2) Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang organisasi dan umum;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

### **Biro Organisasi**

- (1) Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.
- (2) Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
  - b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
  - c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
  - d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Biro Organisasi terdiri atas :

- a. Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. Bagian Tatalaksana.

- (1) Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan.

Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

(2) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

(3) Bagian Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana dan Kepegawaian serta pelayanan publik.

Bagian Tatalaksana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana dan Kepegawaian serta pelayanan publik;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana dan Kepegawaian serta pelayanan publik;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana dan Kepegawaian serta pelayanan publik;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana dan Kepegawaian serta pelayanan publik;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pendokumentasian dan pengarsipan peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya lingkup biro;
- e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, , LKjIP, dan LKPJ lingkup biro;
- f. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- g. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- h. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

### **Biro Umum**

(1) Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan.

Biro Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Biro Umum terdiri atas :

- a. Bagian Rumah Tangga dan Pelayanan Umum;
- b. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; dan
- c. Bagian Administrasi Pimpinan.

(1) Bagian Rumah Tangga dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, dan urusan dalam.

Bagian Rumah Tangga dan Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, dan urusan dalam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, dan urusan dalam; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

- (2) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi sekretariat daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset, Penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset sekretariat daerah.

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan dan verifikasi sekretariat daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset, Penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset sekretariat daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi sekretariat daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset, Penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset sekretariat daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

- (3) Bagian Administrasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, materi, komunikasi pimpinan dan protokol.

Bagian Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, materi, komunikasi pimpinan dan protokol;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, materi, komunikasi pimpinan dan protokol; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Administrasi pimpinan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
- b. Subbagian Materi, Komunikasi Pimpinan dan Protokol; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli mempunyai tugas :
- a. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan umum, koordinasi dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan tata usaha pimpinan dan staf ahli;
  - b. melaksanakan pengumpulan bahan untuk pelayanan administrasi tata usaha pimpinan dan staf ahli;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan staf ahli gubernur;
  - d. menyusun agenda dan administrasi persuratan pimpinan dan staf ahli secara elektronik;
  - e. melaksanakan pengumpulan data, bahan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan pimpinan dan staf ahli;
  - f. mengurus, memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban ruang kerja pimpinan dan staf ahli;
  - g. melaksanakan pengumpulan bahan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan rapat, pertemuan, pelantikan, acara kenegaraan serta upacara hari besar nasional dan lainnya;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Subbagian Materi, Komunikasi Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;
  - b. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan;
  - c. melaksanakan monitoring, evaluasi serta penyusunan dokumentasi dan pelaporan;
  - d. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
  - e. memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
  - f. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
  - g. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - h. menyusun naskah sambutan dan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - i. mendokumentasikan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - j. menyusun notulensi rapat Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - k. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - l. melakukan koordinasi dengan instansi yang memerlukan kegiatan keprotokolan;
  - m. menyusun bahan kebijakan umum hubungan keprotokolan;
  - n. melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan keprotokolan; dan

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum, program kerja dan petunjuk teknis sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
  - c. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro umum;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - f. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN.
  - g. menyiapkan bahan urusan kepegawaian yang meliputi usul kepangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, kenaikan gaji berkala, pembuatan KARIS/KARSU, DUK, SKP, dan Administrasi kepegawaian lainnya lingkup biro umum;
  - h. Menyiapkan Bahan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analilis Beban Kerja;
  - i. Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
  - j. Menyiapkan Bahan Penyusunan Dalam Pengembangan SDM Apatur;
  - k. mengumpul Standar Operasional Prosedur dari masing-masing bagian pada biro umum;
  - l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2.2. Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS seSekretariat Daerah per 31 Desember 2021 sebanyak 258 orang, terdiri dari 143 orang atau 55.21% Laki-laki dan 115 orang atau 44.79% Perempuan.

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah terdiri dari jenjang S3 sebanyak 0.77 % atau 2 orang, S2 sebanyak 24.81 % atau 64 orang, S1 sebanyak 48.84 % atau 126 orang, D.3 sebanyak 3.87 % atau 10 orang, SMU sebanyak 21.32 % atau 55 orang serta SMP sebanyak 0.39 % atau 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat baik.

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari S1, perimbangan gender nya relatif berimbang.

Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SD, SLTP dan SLTA).

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.  
Tingkat Pendidikan ASN Lingkup Sekretariat Daerah

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan				Tingkat Pendidikan						Eselon				
		L	P	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMU	SMP	I	II	III	IV	JF
1	Sekretaris Daerah	1		1				1						1				
2	Asisten	3		3				1	2						3			
3	Staf Ahli Gubernur	2	1	3					3						3			
4	Biro Pemerintahan dan Kesra	27	17	3	34	7		-	10	23	2	9	-	-	1	1	1	12
5	Biro Hukum	14	20	6	19	9		-	11	13	1	9	-	-	1	2	1	10
6	Biro Perekonomian dan Adm. Pembangunan	14	15	6	21	4			10	15	2	4	-	-	1	-	1	9
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	23	13	3	28	5		-	7	24	-	5	-		1	1	1	21
8	Biro Organisasi	16	13	4	18	7		-	5	17	-	7	-	-	1	3	1	9
9	Biro Umum	46	31	3	52	22			16	34	5	21	1		1	3	3	7
	JUMLAH	146	110	32	172	54		2	64	126	10	55	1	1	12	10	8	68

### 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah meliputi pelayanan di bidang; pemerintahan dan kesra, hukum, perekonomian dan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, organisasi serta administrasi, keuangan dan pelayanan umum. Gambaran pelayanan dari 6 Biro yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

#### Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. Kinerja pelayanan yang dilaksanakan :



- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait;

### **Biro Hukum**

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum. Jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundangundangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

### **Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas tugas Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan. Jenis kinerja pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan

### **Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

### **Biro Organisasi**

Biro Organisasi sebagaimana mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana, Jenis layanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

### **Biro Umum**

Biro Umum, mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan;

- b. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam 4 (empat) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:

### a. Tantangan

- 1) Masih terdapat kompetensi sumberdaya aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku.
- 2) Perubahan pola pikir dan budaya kerja normatif aparatur pemerintah menjadi pola pikir dan budaya kerja konstruktif yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
- 3) Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.

### b. Peluang

- 1) Pengembangan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang cukup potensial;
- 2) Komitmen pimpinan cukup tinggi dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.

## 2.5 Aset Sekretariat Daerah.

### 1. Aset Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kendaraan Dinas Roda 4	1	1	-	-
Kendaraan Dinas Roda 2	88	4	8	76
Kursi	74	55	10	9
Meja	46	40	4	2
Lemari	24	12	7	5
AC	11	5	4	2
Komputer	10	7	-	3
Laptop	26	13	4	9

### 2. Aset Biro Hukum.

Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kendaraan Dinas Roda 4	6	6	-	-
Kendaraan Dinas Roda 2	18	11	3	4
Kursi	160	153	4	3

Meja	52	43	9	-
Lemari	29	29	-	-
AC	12	11	-	1
Komputer	23	21	-	2
Laptop	31	23	8	-
Rak Besi	2	2	-	-
Rak Kayu	1	-	-	1
Filling Kabinet	20	19	1	-
Lemari Es (Kulkas)	2	1	1	-
Televisi	4	4	-	-
Wireles	2	2	-	-
Dispenser	3	3	-	-
Faximile	1	1	-	-
Printer	41	37	-	4
Kalkulator	1	1	-	-
Mesin Absen	2	2	-	-
Sofa	2	2	-	-
ALat Penghancur Kertas	5	3	-	1
Kompor Gas	1	1	-	-
Tabung Gas (12 Kg)	1	1	-	-
Mesin Ketik Listrik	2	2	-	-
Peralatan Komputer	6	6	-	-
Layar Infocus/Projector/LCD	4	4	-	-
UPS	1	1	-	-
Server	2	2	-	-
Modem	1	1	-	-
Hub	1	1	-	-
Kipas Angin	1	1	-	-
Scanner	5	5	-	-
Micropone Table Stand	2	2	-	-
Peralatan Studio Lainnya	15	15	-	-
Speaker Komputer (Yamaha)	2	2	-	-
Laser Pointer	1	1	-	-
Tape Recorder	2	2	-	-
Telephone Mobile (Android)	1	1	-	-
Running Tester	1	1	-	-
Alat Listrik	1	1	-	-
Router	1	1	-	-
Peralatan Jaringan Lainnya	2	2	-	-
Bangunan Gedung Lainnya	1	1	-	-

## 3. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kendaraan Dinas Roda 4	4	4	-	-
Kendaraan Dinas Roda 2	8	8	-	-
Kursi	28	28	-	-
Meja	27	27	-	-
Meja Makan Besi	1	1	-	-
Meja Tamu Biasa	1	1	-	-
Meja Panjang	1	1	-	-
Meja Rapat	1	1	-	-
Kursi Rapat	6	6	-	-
Lemari Kayu	4	4	-	-
Lemari Besi / Metal	2	2	-	-
Lemari Arsip Dinamis	2	2	-	-
AC	5	5	-	-
Film/Projector PC	1	1	-	-
PC Unit	17	17	-	-
Laptop / Notebook	11	11	-	-
Tablet	1	1	-	-
Printer / Printer Scan	9	9	-	-
Scanner	1	1	-	-
Lemari Es	2	2	-	-
Televisi	1	1	-	-

## 4. Aset Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Mesin Diesel	1	1	-	-
Station Wagon	1	1	-	-
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	2	-	-
Sepeda Motor	6	6	-	-
Termometer Standar	1	1	-	-
Lemari Penyimpan	7	7	-	-
Mesin Fotocopy Folio	1	1	-	-
Mesin Fotocopy Folio	1	1	-	-
Lemari Besi/Metal	8	8	-	-
Rak Besi	1	1	-	-
Filling Cabinet Besi	2	2	-	-
Brandkas	2	2	-	-
Alat Kantor Lainnya Bardi Smart Door Lock	1	1	-	-
Meja Rapat	19	19	-	-

Kursi Tamu	3	3	-	-
Kursi Tamu	50	50	-	-
Sofa	1	1	-	-
Lemari Es	1	1	-	-
A.C. Split	12	12	-	-
Televisi	1	1	-	-
Wireless	3	3	-	-
Handy Came	1	1	-	-
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	26	26	-	-
Kursi Pejabat Eselon II	3	3	-	-
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40	40	-	-
Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	2	2	-	-
Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	5	-	-
Digital Audio Taperecorder	1	1	-	-
Camera Electronic	2	2	-	-
Tripod Camera	1	1	-	-
Layar Film/Projector	1	1	-	-
LCD Monitor	1	1	-	-
Camera Conference	1	1	-	-
Serial Scanner/Printer	2	2	-	-
P.C Unit	17	17	-	-
Lap Top	35	35	-	-
Note Book - apple /macbook air	6	6	-	-
Note Book - dell/inspiron	1	1	-	-
Note Book - azus/zenbook duo	1	1	-	-
Tablet PC	1	1	1	-
Monitor	1	1	-	-
Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	8	-	-
Scanner (Peralatan Personal Komputer) – Epson	2	2	-	-
Peralatan Personal Komputer lainnya - magic mouse 2 maccbook	6	6	-	-
Peralatan Personal Komputer lainnya – Konektor RJ45	1	1	-	-
Server	1	1	-	-
Rak Server	1	1	-	-
Acces Point - UBIQUTY UAP	2	2	-	-
Peralatan Jaringan lainnya – CISCO GIGABIT MANAGED /switch SG350-52K9-E U	1	1	-	-
Peralatan Jaringan lainnya – FeltegKJet glass	6	6	-	-
Peralatan Jaringan lainnya - asus/zenbook duo ux481fa-bm03 6t	1	1	-	-
Peralatan Jaringan lainnya - penangkal Petir	1	1	-	-
alat penolong lainnya (dst) - Hartex	2	2	-	-

Closed Circuit Television (CCTV)	1	1	-	-
Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	1	-	-
Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	1	-	-

## 5. Aset Biro Organisasi.

Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kendaraan Dinas Roda 4	3	2	1	-
Kendaraan Dinas Roda 2	9	8	1	-
Lemari kayu	1	-	1	-
Alat penghancur Kertas	1	1	-	-
Filing Kabinet	2	2	-	-
Mesin Absensi	1	1	-	-
Meja Telefon	1	1	-	-
Meja 1/2 Biro	1	1	-	-
Kursi Tamu	1	-	-	1
Sofa	2	1	1	-
Lemari Es	2	2	-	-
Ac Split	5	3	-	2
Camera Vidoe	1	-	1	-
Dispenser	1	-	-	1
Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	4	1	-
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	8	2	-
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	24	20	4	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	-	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	5	1	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	6	1	-
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	17	10	7	-
Kursi Rapat Ruang Eselon II	6	6	-	-
Kursi Rapat Ruang Staf	17	17	-	-
Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	2	2	-	-
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	18	12	4	2
Layar Film/ Proyektor	2	1	-	1
Telefon Mobile ( Tab )	1	1	-	-
Printer	11	5	3	3
Converter	1	-	-	1
Komputer	12	8	-	4
Laptop	17	10	4	3
Hardisk	2	-	-	2
Peralatan Mini Komputer	2	-	-	2
Peralatan Pc Lainnya/Ups	1	-	-	1

## 6. Aset Biro Umum.

Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kendaraan Dinas Roda 4	132	120	4	8
Kendaraan Dinas Roda 3	3	3	-	-
Kendaraan Dinas Roda 2	131	97	3	31
Air Conditioner	298	252	-	46
Alat Pemadam Kebakaran	105	94	-	11
Mesin Penghancur Kertas	59	30	-	29
Brandkas	9	5	-	4
Camera	80	25	-	55
Coffee Maker	10	4	-	6
Dispenser	80	36	-	44
Treadmil	4	3	-	1
Exhaust Fan	7	5	-	2
Facsimile	27	2	9	16
Filing Cabinet Besi	81	25	14	42
Genset	8	4	2	2
Handy Talky (HT)	116	39	10	67
Hard Disk	6	2	-	4
Jam Ukir Jepara	30	5	-	25
Karpet	102	65	-	37
Ketam Listrik	3	1	-	2
Kipas Angin	29	12	1	16
Kitchen Set	5	5	-	-
Kompor Gas	34	9	-	25
Kompor Listrik	19	2	-	17
Komputer / P.C	92	28	14	50
Lemari Es	102	42	4	56
Showcase	18	9	1	12
Kursi Kerja	821	239	165	417
Kursi Rapat	1970	821	243	906
Kursi Tunggu	884	53	62	769
Laptop/noteboo	236	65	12	159
Lemari kayu Arsip	6	2	1	3
Lemari kaca	25	17	3	5
Lemari Pakaian	20	15	1	4
Meja Kerja	221	34	17	170
Meja Makan	40	22	3	15
Meja Rapat	39	27	5	7
Meja Tamu	26	9	-	17
Mesin Absensi	7	7	-	-
Mesin Ampelas	2	-	-	2



Mesin Bor	15	3	5	7
Mesin Cuci	15	5	2	8
Mesin Fotocopy	27	3	8	16
Mesin Gergaji	3	1	1	1
Mesin ketik listrik	12	2	-	10
Mesin Ketik Manual	34	3	-	31
Mesin Kompresor	5	-	1	4
Mesin Las listrik	5	1		4
Mesin Pemotong Rumput	21	7	5	9
Mesin Penghisap Debu	33	7	2	24
Microphone	62	12	25	25
Mixer Sound	27	12	10	5
Orgen/Electrone	9	4	2	3
Oven Listrik	4	2	-	2
Pompa Air	7	4	1	2
Printer	310	78	19	213
Rice Cooker (Alat Dapur)	5	3	-	2
Router	15	8	-	7
Scanner	53	25	3	25
Sound	170	15	6	149
Tabung Gas	9	-	-	-
Tangga Aluminium	7	2	1	4
Tangga Hidrolik	2	1	1	-
Televisi	181	47	9	125
Tempat Tidur	90	37	2	51
Tenda	78	53	7	18
Uninterruptible Power Supply (UPS)	59	14	9	36
Wireless	14	8	2	4

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah :

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Pada tataran Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perencanaan lingkup Sekretariat Daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan asset lingkup Sekretariat Daerah.
3. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lingkup Sekretariat Daerah.
4. Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur lingkup Sekretariat Daerah.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Sekretariat Daerah.
6. Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai pasca bencana gempa bumi.

Selain permasalahan umum di atas, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas aparatur Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara optimal berdasarkan analisis beban kerja sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja organisasi.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan budaya kerja pada setiap unit belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
3. Sarana dan prasarana pelayanan Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara maksimal.

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Kurangnya sinergitas dengan lembaga pemerintahan lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

2. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat dinamis mempengaruhi perubahan tata kelola pemerintahan.
3. Kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Tabel.3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  
dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Belum optimalnya koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah	Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap penyusunan LPPD
		Rendahnya komitmen dan respon perangkat daerah terhadap LPPD
		Kurangnya pemahaman, responsivitas dan komitmen terhadap SPM
		Rendahnya responsivitas terhadap penataan batas wilayah dan Kerjasama daerah
		Koordinasi terhadap penataan batas wilayah dan kerjasama daerah belum optimal
		Koordinasi penyusunan LKPJ dan Memori Jabatan belum optimal
		Koordinasi dan responsivitas terhadap Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat masih rendah
Belum Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum	Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang tidak berjalan sesuai jadwal	Rendahnya pemahaman mekanisme dan prosedur pengelolaan bantuan dan hibah
		Koordinasi dan responsivitas terhadap kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar belum optimal
		Lemahnya perencanaan, sinkronisasi dan koordinasi penyusunan Propemperda
		Standar operasional prosedur penyusunan produk hukum daerah yang belum berjalan secara optimal
		Belum adanya ASN yang memenuhi standarisasi dan bersertifikasi sebagai perancang peraturan perundang-undangan
		Masih terdapat regulasi yang tidak sinkron
		Fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang belum maksimal

		Kurangnya koordinasi dalam proses fasilitasi dan evaluasi produk hukum dengan bagian hukum kabupaten
	Fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum yang belum maksimal	Kurangnya koordinasi dan standar layanan dalam pelayanan penanganan bantuan hukum belum tersedia
		Belum adanya ASN Biro Hukum yang dapat mewakili pemerintah daerah dalam beracara dilembaga peradilan
Belum Optimalnya Fasilitasi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Sistem informasi pembinaan perekonomian belum optimal	Belum tersedianya penyusunan perencanaan sistem informasi pembinaan perekonomian
		Kurangnya fasilitasi dan kerjasama antar lembaga terkait
		Rendahnya kualitas SDM pengelola BUMD dan BLUD
	Perumusan kebijakan, pengendalian dan pengawasan belum maksimal	Kurang efektifnya implementasi sistem pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah
		Lemahnya koordinasi dan penguatan integrasi sistem penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah
Belum Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa	Proses pengadaan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa belum optimal	Pola koordinasi dan implementasi standar operasional prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik belum optimal
		Lemahnya konsolidasi perencanaan pengadaan barang dan jasa
	Proses pengadaan dan pelayanan jasa secara elektronik belum optimal	Minimnya sarana dan prasarana penunjang LPSE
		Belum tersusunnya e-katalog lokal
	Kapasitas SDM, pelaksanaan fungsi advokasi dan kematangan kelembagaan barang dan jasa belum memadai	Kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana pendukung layanan secara elektronik masih terbatas
		Belum optimalnya fungsi advokasi dan kematangan kelembagaan barang dan jasa
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Capaian 8 (delapan) area perubahan yang masih rendah	Rendahnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dan SAKIP
		Belum optimalnya penataan dan penguatan kelembagaan

		Penataan ketatalaksanaan (peta proses bisnis) belum dikelola dengan baik
		Penguatan dan pengukuran Standar Operasional Prosedur (monitoring dan evaluasi) berbasis jenis layanan yang belum ditetapkan
		Belum efektifnya agen perubahan dan belum terbangunnya budaya kerja
		Rendahnya manajemen kinerja SDM, koordinasi pelaksanaan assessment centre dan penilaian disiplin pegawai
	Rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	Masih rendahnya perencanaan kinerja dan penerapan manajemen kinerja berbasis elektronik
		Belum adanya penerapan reward dan punishment secara ketat
		Kurangnya monitoring dan evaluasi pelayanan publik
Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan administrasi pimpinan serta fasilitasi perangkat daerah	Pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan belum optimal	Penerapan standar operasional prosedur pada pelayanan kerumahtanggaan belum optimal
		Rendahnya kompetensi teknis dalam pelayanan kerumahtanggaan
		Kurangnya sarana dan prasarana kerumahtanggaan
		Belum optimalnya koordinasi dalam pemberian layanan kerumahtanggaan
	Pengelolaan keuangan lingkup sekretariat yang belum maksimal	SOP pengelolaan keuangan belum optimal
		Belum optimalnya penyesuaian terhadap sistem pengelolaan keuangan
	Belum optimalnya Pengelolaan barang milik daerah lingkup sekretariat	Penerapan Standar operasional prosedur pengelolaan barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah yang belum optimal
		Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah

	Belum optimalnya pelayanan administrasi pimpinan dan perangkat daerah	Belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur pelayanan administrasi pimpinan
		Belum tersedianya digitalisasi pengelolaan administrasi pimpinan dan perkantoran
	Belum optimalnya penyiapan materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan	Belum tersedianya standar operasional prosedur dalam pelaksanaan penyiapan materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan
		Masih kurangnya kapasitas SDM penyiapan materi pimpinan dan keprotokoleran

### 3.2. Telaahan Program Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat 2023 – 2026 merupakan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Sulawesi Barat. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Sulawesi Barat.

Pada tataran Sekretariat Daerah, hasil telaahan Program Pembangunan Daerah dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Perlu sinkronisasi penyusunan perencanaan lingkup Sekretariat Daerah dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah.
2. Perlunya efektifitas tatakelola keuangan dan asset lingkup Sekretariat Daerah.
3. Perlu mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi lingkup Sekretariat Daerah.
4. Perlu mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia aparatur lingkup Sekretariat Daerah.
5. Perlu mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Sekretariat Daerah.
6. Perlu mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

### 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dalam kurun waktu 2023 – 2026, adalah sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum Optimalnya koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang menjadi kewenangan di pemerintah provinsi memiliki dinamika yang

dipengaruhi oleh banyak faktor. Kehadiran Pemerintah Provinsi dalam mengefektifkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah termasuk kabupaten menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan serta penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi lain peranan sekretariat daerah sebagai pendukung urusan pemerintahan juga memberikan pengaruh dalam efektifnya penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, terdapat sejumlah kendala, antara lain :

- a. Belum Optimalnya fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam upaya fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintah, koordinasi menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi. Kemampuan SDM dalam melakukan diplomasi menjadi salah satu hal yang penting untuk dimiliki. Sebab dalam upaya fasilitasi ini, benturan kepentingan seringkali tidak dapat dihindarkan sehingga upaya untuk menemukan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak harus bisa terwujud.

Upaya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melibatkan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementerian Dalam Negeri serta masing-masing kabupaten/kota serta kecamatan yang berbatasan baik dalam lingkup batas antarprovinsi maupun batas daerah di dalam wilayah Sulawesi Barat.

Kemunculan klaim atas wilayah Sulawesi Barat harus terus diantisipasi dengan kesiapan sumber daya baik sumber daya manusia maupun kelengkapan data dan dokumen yang bisa menjadi kekuatan hukum dalam mengklaim wilayah khususnya wilayah terluar Sulawesi Barat.

- b. Belum optimalnya fasilitasi kerjasama daerah.

Peran fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi salah satu peran penting yang banyak mendukung dalam pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi Barat. Namun peran fasilitasi ini seringkali tidak dapat berjalan dengan maksimal akibat kurangnya perhatian instansi terkait atas kebutuhan data serta kelengkapan laporan tindak lanjut atas kerjasama yang dilakukan.

Secara hukum daya ikat untuk meminta instansi yang telah difasilitasi kerjasamanya untuk melaporkan tindak lanjut kerjasama masih lemah. Meskipun telah terbit Permendagri 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Permendagri 25 tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga Luar Negeri, namun belum ada perda yang secara khusus mengikat di lingkup Pemerintah Sulawesi Barat.

Padahal laporan atas tindak lanjut fasilitasi kerjasama ini menjadi hal yang dinilai oleh pemerintah pusat atas kinerja pemerintah daerah. Untuk itu

dukungan untuk mengoptimalkan fasilitasi kerjasama daerah ini perlu untuk dikuatkan.

- c. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas amanat yang diterima melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Penyusunan LPPD sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang Undang 23 tahun 2014 menjadi laporan kepada pemerintah pusat terkait pelaksanaan desentralisasi/ urusan yang telah diselenggarakan pemerintah daerah. Sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) serta Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan dokumen penting yang menunjukkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi disetiap tahunnya.

Peran Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Barat serta penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di tingkat Kabupaten se Sulawesi Barat.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) , Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), komitmen pimpinan dalam hal ini, Kepala Daerah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah adalah hal yang sangat dominan untuk memudahkan upaya koordinasi dan memastikan proses pembinaan, evaluasi dan monitoring berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal.

Dalam proses ini, pemahaman aparatur baik di internal selaku pendukung dalam proses pembinaan, dan monitoring; maupun pemahaman aparatur di masing-masing perangkat daerah yang sangat penting untuk diperhatikan . Sebab ketersediaan dan pemahaman atas data yang dibutuhkan berpengaruh secara langsung dalam upaya peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).



d. Belum Optimalnya Fasilitas Pembentukan Daerah Otonomi Baru.

Pembentukan daerah otonomi baru menjadi isu yang selalu muncul setiap tahunnya sebab aspirasi masyarakat terkait pembentukan daerah otonomi baru terus disuarakan. Namun upaya fasilitasi ini belum dapat dilakukan dengan maksimal sebab moratorium pemekaran daerah yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 masih belum dicabut.

Di sisi lain fasilitasi pembentukan daerah otonomi baru tetap harus dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen terkait pembentukan daerah otonomi baru yang *urgent* untuk segera ditindaklanjuti sudah siap saat moratorium dicabut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembentukan kota Mamaju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Maka upaya antisipasi atas pencabutan moratorium harus terus dilakukan dengan memastikan kelengkapan data dan ketersediaan data serta dokumen yang dibutuhkan selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menyukseskan upaya pembentukan Kota Mamuju.

e. Belum optimalnya fasilitas kepala daerah, wakil kepala daerah dan DPRD.

Isu strategi terkait fasilitas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD harus menjadi salah satu isu utama pada 2024 sebab Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pemilu Serentak akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November 2024.

Dalam proses fasilitasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, koordinasi yang efektif diperlukan untuk memastikan proses pemilihan hingga pengambilan sumpah jabatan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hal ini termasuk pula seluruh kelengkapan administrasi yang disyaratkan untuk penetapan pejabat yang ditunjuk. Untuk mengantisipasi hal ini, maka segala sumber daya yang dibutuhkan harus sudah siap saat pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan.

f. Belum optimalnya implementasi peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Gubernur selaku pimpinan di lingkup pemerintah Provinsi telah diamanatkan untuk melaksanakan sejumlah peran yang sebelumnya dilaksanakan penuh oleh pemerintah pusat. Gubernur mengemban 46 jenis tugas dan wewenang dalam perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dari sejumlah peran tersebut, setiap tahunnya ada penguatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong efektivitas pelaksanaan peran tersebut. Namun dalam prosesnya masih terdapat sejumlah tantangan yang membuat peran ini masih belum bisa diterapkan dengan optimal. Sejumlah wewenang yang sudah dilimpahkan dari pemerintah pusat ke

Gubernur masih belum dipahami oleh pemerintah kabupaten dan instansi vertikal.

2. Belum optimalnya koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan terkait kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas dan fungsi sekretariat daerah mencakup hibah rumah ibadah, serta fasilitasi kebijakan di bidang kesejahteraan pelayanan dan non pelayanan dasar.

Pelaksanaan fungsi ini masih menghadapi sejumlah masalah antara lain :

a. Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan.

Fasilitasi terkait bidang keagamaan ini banyak yang menjadi isu penting sebab menjadi salah satu aspek yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kegiatan Hibah Rumah Ibadah yang selalu dilakukan setiap tahun menjadi salah satu hal yang banyak dimanfaatkan oleh umat beragama yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Bantuan rumah ibadah ini membutuhkan sumber daya yang cukup untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas rumah ibadah yang akan dan telah menerima bantuan.

Salah satu kendala yang cukup terasa di lapangan adalah keterbatasan sumber daya serta lokasi rumah ibadah yang menerima bantuan tersebut. Sejumlah rumah ibadah yang terletak di pelosok masih memiliki akses media komunikasi dan transportasi yang terbatas. Hambatan eksternal ini berbenturan langsung dengan hambatan internal terkait terbatasnya sumber daya baik transportasi maupun komunikasi yang mendukung mobilitas tim evaluasi dan monitoring di lapangan.

Pelaksanaan MTQ dan STQ pun perlu menjadi perhatian penting karena berpengaruh langsung pada pandangan publik pada Pemerintah Sulawesi Barat. Keikutsertaan pada ajang MTQ dan STQ saja tidak akan bisa menaikkan citra positif masyarakat atas kemampuan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan di bidang Keagamaan. Upaya untuk meraih posisi pemenang di kompetisi tersebut juga perlu menjadi perhatian yang berarti upaya koordinasi dan pembinaan di tingkat kabupaten dan provinsi perlu direncanakan dan dilakukan dengan baik.

b. Belum optimalnya koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Pemahaman atas peran pemerintah provinsi khususnya Sekretariat Daerah dalam fasilitasi kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar masih rendah. Hal ini menghambat proses koordinasi dalam upaya fasilitasi yang dilakukan.

Hal ini tercermin dalam peran pemerintah Provinsi terkait dana BOS yang belum diatur secara jelas sehingga dalam panyaluran dana BOS bisa terjadi melibatkan komunikasi langsung antara KPPN dengan pihak sekolah di

kabupaten/kota tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Hal ini menjadi sangat penting untuk dibuatkannya aturan hukum yang secara jelas menetapkan SOP dan peran masing-masing instansi/perangkat daerah dalam penyaluran dan pengawasan dana BOS ini.

Di sisi lain, peran Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat terkait non pelayanan dasar di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan masih belum sepenuhnya dipahami oleh instansi teknis serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pelibatan secara aktif oleh instansi teknis dalam upaya perumusan kebijakan di bidang tersebut perlu dilakukan.

b. Belum Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam proses pembentukan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah/peraturan gubernur, dimulai dari perencanaan yang dikenal dengan propemperda dan propemperkada. Pelaksanaan perencanaan ini sering mengalami hambatan disebabkan kurangnya komunikasi antara perangkat daerah pemrakarsa dengan pihak DPRD sebagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan.

Pembinaan produk hukum daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan provinsi oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan fasilitasi ini, beberapa rancangan peraturan ditolak atau dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, hal ini disebabkan oleh karena materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Di samping itu, koordinasi dari Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam proses perencanaan pembentukan peraturan masih kurang, sehingga dalam proses penyusunan tidak maksimal.

Belum optimalnya penyusunan peraturan perundang-undangan juga disebabkan oleh sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana sampai saat ini belum ada PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang bersertifikat sebagai perancang. Disamping itu, pola kerja yang belum efektif karena standar operasional prosedur belum dapat dijalankan secara optimal.

2. Belum Optimalnya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, salah satu tugas Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Hukum adalah melakukan pembinaan produk hukum daerah melalui fasilitasi dan evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Perkada. Dimana dalam pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota belum dapat optimal disebabkan oleh karena masih kurangnya tenaga analis untuk mengevaluasi serta masih lemahnya perencanaan pembentukan peraturan di kabupaten.

3. Belum Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Bantuan Hukum.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum yang ditujukan kepada kepala daerah, perangkat daerah, dan lembaga pemerintahan di bawahnya yang timbul dari pihak swasta, masyarakat maupun perorangan. Kepala daerah mempunyai tugas untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan namun dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya perkara hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diperlukan penanganan dan penyelesaian secara komprehensif untuk penyelesaian sengketa di badan peradilan.

Dalam rangka penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta sebagai standarisasi metode penyelesaian permasalahan litigasi dan non litigasi, sementara itu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bahwa dalam penanganan perkara pemerintah daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

c. Belum Optimalnya Fasilitasi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Sistem Informasi Pembinaan Perekonomian Belum Optimal.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (*administered prices*).

Peningkatan fasilitasi kebijakan perekonomian tidak hanya terfokus pada pengendalian inflasi, juga diharapkan adanya peningkatan Pendapatan Daerah melalui fasilitasi Akses Keuangan Daerah yang dapat menjembatani masyarakat pengusaha mendapatkan dukungan keuangan dari Lembaga-lembaga jasa keuangan dalam menjalankan usahanya. Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari sejauh mana kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin untuk menetapkan dan mengambil keputusan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal kebijakan ekonomi, implementasinya diwujudkan dalam pembuatan regulasi dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Memasuki era baru sistem pemerintah di Indonesia terutama sejak dilaksanakannya otonomi daerah, pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan daerah sudah lebih leluasa dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerah, khususnya dalam bidang ekonomi demi memperkuat ekonomi lokal yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan terutama bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menciptakan sinergitas antara pelaku usaha dan instansi terkait diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan prima bagi setiap masyarakat khususnya pelaku usaha dalam hal pembuatan perijinan usaha yang dapat diperoleh dengan cepat, murah, dan ramah serta untuk mengakses lembaga-lembaga permodalan dapat kiranya difasilitasi oleh pemerintah sehingga sektor riil akan dapat bergerak lebih nyata karena pelaku usaha memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan produktifitas dan akses informasi dapat kiranya dibangun dengan penyebaran yang merata agar supaya pelaku usaha mendapatkan informasi dengan mudah dan akurat.

Di samping itu juga pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD juga perlu peningkatan dalam hal peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Penyelenggaraan fasilitasi kebijakan perekonomian khususnya dalam fasilitasi TPID, TPAKD, BUMD dan BLUD diperlukan penguatan-penguatan terhadap beberapa hal yang merupakan akar permasalahan dari hal tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya penyusunan perencanaan sistem informasi pembinaan perekonomian.

Untuk penanganan akar masalah ini, diperlukan adanya suatu perencanaan system pembinaan perekonomian yang disusun dan diinformasikan kepada seluruh *stakeholder*, agar dalam penyelenggaraan fasilitasi pengendalian Inflasi Daerah, fasilitasi akses keuangan daerah bagi masyarakat pengusaha kepada Lembaga-lembaga jasa keuangan dapat lebih memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah.

- b. Kurangnya fasilitasi dan kerja sama antar lembaga terkait.  
Fasilitasi dan kerja sama yang selama ini dibangun dengan pihak Bank Indonesia dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu lebih ditingkatkan dan juga perlu lebih melibatkan *stakeholder* terkait lainnya, baik itu dari Lembaga/instansi keuangan lainnya, perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten serta masyarakat-masyarakat pengusaha mikro maupun makro.
- c. Rendahnya kualitas SDM pembina dan pengelola BUMD dan BLUD.  
Pembinaan BUMD dan BLUD merupakan babak baru dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, hal ini diperlukan penguatan dalam hal peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pembina BUMD dan BLUD. Kemudian dalam mendukung pencapaian peningkatan Pendapatan Daerah perlu adanya peningkatan Kapasitas terhadap SDM Pengelola BUMD dan BLUD mulai dari system perekrutan sampai dengan cara-cara pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Perumusan Kebijakan, Pengendalian dan Pengawasan Administrasi Pembangunan Daerah Belum Maksimal.

Dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran, Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) membutuhkan suatu sistem yang dapat terintegrasi langsung kepada setiap SKPD dan Kabupaten yang ada sehingga proses pengawasan realisasi penyerapan anggaran dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk melihat perkembangan dalam penyerapan anggaran dalam pengambilan kebijakan.

TEPRA diharapkan dapat menjadi alat guna mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, TEPRA juga diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran, sehingga diharapkan dengan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, roda perekonomian dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Adapun akar masalah dari tidak maksimalnya perumusan kebijakan, pengendalian dan pengawasan administrasi pembangunan antara lain :

- a) Kurang efektifnya implementasi sistem pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah.

Dalam akar masalah ini pelaksanaan penggunaan system pengendalian pembangunan daerah belum efektif diimplementasikan pada masing-masing Perangkat Daerah baik itu di Provinsi maupun Kabupaten, untuk itu diperlukan penguatan-penguatan dalam mengawal implementasi penggunaan aplikasi ini.

- b) Lemahnya koordinasi dan penguatan integrasi sistem penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah.

Memasui era digitalisasi dan seiring perkembangan teknologi, banyaknya terobosan-terobosan baru dalam mendukung percepatan administrasi pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat dengan beraneka ragamnya aplikasi sistem penyelenggaraan pemerintahan, hal ini juga perlu monitoring dan kontrol terhadap adopsi penggunaan aplikasi sehingga tidak terjadinya penggunaan aplikasi yang banyak namun dengan fungsi yang hamper sama. Monitoring dimaksudkan agar aplikasi yang digunakan dalam pengawasan pembangunan daerah baik itu aplikasi perencanaan, aplikasi pengelolaan keuangan maupun aplikasi pelaporan dapat terintegrasi satu sama lain dan tidak terdapat lagi penggunaan aplikasi berbeda dengan memiliki fungsi yang hampir sama.

- d. Belum Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Proses pengadaan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara eletronik belum optimal.

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pusat maupun daerah terus menyiapkan regulasi yang dianggap dapan mendukung percepatan proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Bukan hanya itu, pengembangan system SPSE juga terus diselaraskan.

Kendati demikian, nampaknya percepatan proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal dicapai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Lambatnya proses perencanaan, ketidak cakapan pelaku pengadaan dan faktor-faktor lain menjadi penyebab keterlambatan. Akibatnya sering ditemui masalah dalam hal realisasi dan pembayaran pekerjaan.

Hal ini menjadi sangat penting untul mendapat perhatian serius. Kolaborasi kerja antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan semua stake holders harus semakin ditingkatkan. Demikian pula dengan kegiatan monitoring pimpinan yang efektif sangat dibutuhkan.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pengadaan yang sudah ada. Pengelolaan perangkat yang baik akan sangat menentukan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, LPSE memegang peranan yang sangat penting.

Pemenuhan sarana-prasarana LPSE dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pendampingan adalah salah satu faktor yang sangat penting, mulai dari backup keamanan sampai pada fasilitas administrasi. Selain itu keberadaan aplikasi lokal penunjang yang baik akan sangat mendukung kinerja LPSE

2. Kapasitas SDM, pelaksanaan fungsi advokasi dan kematangan kelembagaan barang dan jasa belum memadai.

Pelaku pengadaan barang dan jasa sangat menentukan efektifitas proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Mulai dari proses perencanaan sampai dengan selesainya pekerjaan. Oleh sebab itu pengembangan kapasitas SDM perlu mendapat perhatian yang serius.

Saat ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa belum memiliki personil perencana, pengelola kontrak dan pengelola swakelola. Belum lagi kebutuhan personil dalam bidang kelembagaan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Selain itu, kebutuhan SDM eksternal Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga perlu mendapat perhatian. Termasuk di dalamnya ketersediaan SDM pelaku pengadaan pada setiap perangkat daerah dan pembinaan penyedia sebagai mitra. Semua ini perlu dikolaborasikan agar efektifitas proses pengadaan barang jasa bisa diwujudkan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak hanya berfokus pada proses pemilihan penyedia barang jasa saja. Pada sisi lain, aspek seperti kelembagaan dan advokasi juga menjadi prioritas utama. Inilah ruh dari transformasi Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Pada sisi kelembagaan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dituntut untuk menjadi Lembaga dengan manajemen yang baik. Hal ini dilakukan dengan pemenuhan standarisasi dan pola kerja yang standar. Demikian pula dalam menjalankan fungsi kordinator UKPBJ kabupaten/kota di Sulawesi Barat.

Pada Aspek Advokasi, keberadaan UKPBJ dituntut untuk selalu memberi pendampingan. Penyelenggaraan kegiatan konsultasi yang berkesinambungan menjadi sangat penting. Demikian pula kegiatan upgrading pengetahuan melalui diklat, sertifikasi dan sosialisasi.

- e. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Capaian 8 (delapan) area perubahan yang masih rendah.

Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 55 Tahun 2020, menjadi petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Provinsi sebagai dasar untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Didalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tersebut menyebutkan sasaran reformasi birokrasi yaitu :

- a) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- b) Birokrasi yang Kafabel;
- c) Pelayanan publik yang prima.



Untuk mencapai sasaran sebagaimana disebutkan diatas perlu perbaikan area perubahan reformasi birokrasi diantaranya :

- a) Masih rendahnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dan SAKIP.

Untuk mendapatkan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara substansi Pemerintah Provinsi berbasis Perangkat Daerah harus berbenah dan mereformasi unit kerjanya secara lebih konkrit. Komitmen pimpinan Organisasi Perangkat daerah selama ini dianggap masih rendah, terbatasnya pemahaman dan kesadaran Kepala Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga mempengaruhi pengambilan kebijakan pimpinan. Belum efektifnya agen perubahan mempengaruhi budaya kerja ASN masih rendah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dirumuskan dalam suatu system, seharusnya menjadi perhatian pimpinan, perlu ada monitoring evaluasi secara berkala dan koordinasi dengan Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi.

- b) Kebijakan terkait kelembagaan yang sering berubah-ubah mempengaruhi penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang "ramping struktur, kaya fungsi". Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.
- c) Penataan ketatalaksanaan (peta proses bisnis) belum dikelola dengan baik, Oleh karenanya penataan ketatalaksanaan lebih diarahkan pada penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat daerah, Penguatan dan pengukuran Standar Operasional Prosedur (S.O.P) berbasis jenis layanan perlu penguatan dengan cara monitoring dan evaluasi.
- d) Masih rendahnya Manajemen Kinerja SDM, koordinasi pelaksanaan Assessment Centre dan penilaian disiplin pegawai. Oleh karenanya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perlu segera dilakukan misalnya manajemen kinerja Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan Assesmen centre butuh koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Perovinsi. Penguatan Manajemen Kinerja Pemerintah Provinsi akan mempengaruhi pengembangan SDM oleh Badan Pengembangan SDM.

Apa yang harus dilaksanakan, solusinya bagaimana. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Biro Organisasi sebagai unit kerja penanggung jawab Reformasi Birokrasi.

Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat, sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi berpedoman kepada Roadmap Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan. Pasal 6 menyebutkan Quick Wins reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 terdiri dari :

- a) One Innovation one agency yang didorong oleh Agen Perubahan dan kompetisi antar Perangkat Daerah;
  - b) Deregulasi Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur terkait kewenangan Provinsi dan peta kebijakan cenderung overlapping;
  - c) Penyederhanaan Perangkat Daerah yang terkait dengan perizinan dan investasi;
  - d) Penyusunan dan implementasi Peta Proses Bisnis, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
  - e) Pembentukan dan penguatan assessment center;
  - f) Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Terintegasi;
  - g) Penetapan unit kerja Zona Integritas, WBK dan WBBM;
  - h) Penyediaan gerai Pelayanan Publik.
2. Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi.

Sebelum kita membahas permasalahan terkait akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, terlebih dahulu kami kemukakan faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan akuntabilitas tidak berlangsung disuatu negara menurut Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (edisi kedua) LAN RI 2004, antara lain :

- a. Tingkat pemahaman yang rendah;
- b. Gaji yang rendah;
- c. Dekadensi moral;
- d. Manajemen "Semau Gue"
- e. Buruknya Sistem Akuntansi;
- f. Kurangnya kemampuan dalam penerapan akuntabilitas;
- g. Kekakuan Birokrasi;
- h. Rendahnya Kualitas SDM.

Selain faktor yang mempengaruhi sebagaimana disebutkan di atas, juga terdapat akar permasalahan terhadap rendahnya akuntabilitas kinerja provinsi, antara lain :

- a) Masih rendahnya perencanaan kinerja dan penerapan manajemen kinerja berbasis eletronik.
- b) Belum adanya penerapan reward dan punishment secara ketat.
- c) Kurangnya monitoring dan evaluasi pelayanan publik.

Oleh karenanya permasalahan ini perlu dijawab sehingga bisa menjadi solusi dalam bentuk program dan kegiatan atau sub kegiatan pada Biro Organisasi.

## f. Belum Optimalnya Pelayanan Pimpinan dan Fasilitas Administrasi Perangkat Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

## 1. Pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan belum optimal.

Pelayanan pimpinan dan perangkat daerah antara lain untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan pelayanan kerumahtanggaan di lingkup perkantoran maupun rumah jabatan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi yakni kurangnya pengendalian dan keterlambatan penyediaan logistik pada rumah tangga pimpinan dan kurangnya pengendalian, pengawasan serta pemeliharaan kendaraan dan bangunan. Hal tersebut menjadi faktor lemahnya Pelayanan Kerumahtanggaan dan pelayanan umum. Padahal Salah Satu Sentral Pelayanan Pimpinan Berada Pada Biro Umum oleh karenanya hal tersebut harus mendapatkan penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Pemahaman terkait pelaksanaan tugas pramusaji dan supir pimpinan/ operasional juga masih perlu di tingkatkan mengingat hal tersebut merupakan kegiatan yang melekat dan merupakan pelayanan langsung.

Kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi permasalahan dalam pelayanan kerumahtanggaan utamanya pada peralatan dan perlengkapan dalam pelayanan dan pendampingan. Kebutuhan peralatan keraja serta sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas masih kurang memadai.

Masih perlunya Koordinasi dalam pemberian layanan kerumahtanggaan yang efektif agar kegiatan yang dilaksanakan dapat sikron dan terlaksana dengan baik.

## 2. Pengelolaan keuangan lingkup sekretariat yang belum maksimal.

Sistem manajemen keuangan daerah (*Financial Management System*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *Good Governance* di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah ménata sistem perencanaan dan penganggaran, sistem penatausahaan, sistem akuntansi dan pelaporan. Tuntutan pembaharuan dan akuntabilitas sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan mendasarkan konsep *value for money*, sehingga tercipta akuntabilitas public (*Public accountability*).

Penerapan standar operasional prosedur yang belum optimal menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sehingga sering terjadi miss komunikasi dan *human eror* sehingga menghambat pelaksanaan tugas yang ada.

Penyesuaian sistem pengelolaan keuangan juga menjadi penghambat percepatan pengelolaan keuangan utamanya pada proses perencanaan penganggaran dan pencairan keuangan. Aplikasi yang masih dalam pemutakhiran

dan perbedaan server pada system membuat proses penginputan menjadi tidak efisien.

3. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah lingkup sekretariat.

Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian

Pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Dengan pengelolaan barang milik daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan prinsip *good governance* diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan barang milik daerah.

Sistem pengelolaan barang milik daerah tidak hanya mencakup pengelolaan barang milik daerah tetapi juga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimulai dari proses perencanaan pengadaan sebagai pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran sampai pada proses penghapusan yang dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan.

Barang milik daerah sekretariat daerah yang penatausahaannya berada pada Biro Umum mempunyai beberapa tantangan kedepannya diantaranya tingkat kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup tinggi sedangkan kebutuhan anggaran yang kurang memadai, barang milik daerah yang masih dikuasai pihak lain atau sudah tidak diketahui keberadaannya, pencatatan dan kodifikasi barang milik daerah belum optimal serta barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah selain itu juga penggunaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang tidak optimal.

Dalam pencatatan dan kodifikasi barang milik daerah juga masih perlu di optimalkan mengingat keadaan pasca bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan beberapa barang milik daerah harus dilakukan penghapusan dan pencatatan ulang.

4. Belum optimalnya pelayanan pimpinan dan perangkat daerah.

Pelayanan pengelolaan administrasi pimpinan dan perangkat daerah merupakan ujung tombak pelayanan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pimpinan atau pejabat pemerintah harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika pengelolaan administrasi tidak dilakukan dengan baik pula.

Salah satu aspek yang sangat mendukung kinerja urusan pemerintahan yaitu dengan adanya pengelolaan administrasi pimpinan dan perangkat daerah

yang meliputi pelayanan persuratan, pengarsipan dokumen, penyiapan materi dan komunikasi pimpinan serta pelayanan keprotokolan.

Pengelolaan administrasi pimpinan dan perangkat daerah merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan pimpinan sebagai pejabat pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dilihat dari tata kelola administrasi yang baik serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen yang baik dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pengelolaan administrasi pemerintahan terlebih pada pelayanan pengelolaan administrasi pimpinan dan perangkat daerah.

Pengelolaan administrasi pada pemerintahan daerah yang mutakhir menuju percepatan pembangunan yang maju dan bersaing sudah selayaknya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital dan sistem daring. Dengan demikian, pelayanan pimpinan yang membutuhkan fasilitasi tata kelola administrasi baik pada aspek administrasi persuratan dan pengarsipan, penyiapan materi pimpinan, fasilitasi komunikasi, pelaksanaan acara dan keprotokoleran dapat dilakukan dengan cepat dengan sistem yang terintegrasi

Biro Umum Sekretariat Daerah menjalankan fungsi utama yaitu pelayanan pimpinan dan perangkat daerah antara lain untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan pelayanan kerumahtanggaan di lingkup perkantoran maupun rumah jabatan.

5. Belum optimalnya penyiapan materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan.

Fasilitasi materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan merupakan hal yang sangat perlu mendapat perhatian mengingat tertib dan lancarnya kegiatan pimpinan ditentukan pengaturan acara dan penyiapan materi serta komunikasi antar penyelenggaraan kegiatan.

Perlunya peningkatan keterampilan dasar sangat diperlukan dikarenakan sumberdaya yang ada masih kurang memahami terkait keprotokoleran. Pelatihan terkait penyiapan materi pimpinan juga perlu dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas materi pimpinan serta kemampuan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pendampingan pimpinan masih kurang efektif.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					
				Baseline (2021)	Perkiraan (2022)	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Optimalnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian LPPD	3	3.40	3.41	3.45	3.50	3.56
			Persentase Fasilitasi Penataan Batas Wilayah Administrasi	70%	75%	80%	85%	90%	100%
			Persentase fasilitasi Kerjasama daerah	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase fasilitasi di bidang otonomi daerah	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Fasilitasi dan Pembinaan di bidang Keagamaan	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

			Persentase Fasilitas Kesejahteraan Rakyat Pelayanan dan Non Pelayanan Dasar	100	100%	100%	100%	100%	100%
		Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum	Persentase Fasilitas Peraturan Perundang-undangan Provinsi	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Fasilitas Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Optimalnya Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitas Kebijakan Bidang Perekonomian	85%	85%	90%	90%	90%	95%
			Persentase Pengelolaan Administrasi Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa	Persentase Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan SDM	55%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penilaian MCP KPK	71%	85%	90%	95%	100%	100%
			Pemenuhan Standarisasi LPSE	12	17	17	17	17	17
		Optimalnya Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	A
			Indeks Pelayanan Publik	B-	B	B+	B+	B+	A

			Indeks Kematangan Organisasi	28.1-37	28.1-37	28.1-37	37.1-46	37.1-46	37.1-46
		Optimalnya Pelayanan Pimpinan dan Fasilitasi Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan	N/A	3,2	3,2	3,4	3,6	3,7
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Lingkup Sekretariat	98.60%	98.70%	98.80%	98.85%	98.90%	99.00%
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penatausahaan Administrasi Pimpinan dan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penyiapan Materi, Komunikasi dan Keprotokoleran Pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, ditetapkan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah, yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPD 2023-2026, sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Optimalnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatkan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan	Optimalisasi koordinasi terhadap penataan batas dan kerjasama daerah
		Meningkatkan perumusan kebijakan daerah di bidang otonomi daerah	Peningkatan poin LPPD
			Optimalisasi koordinasi di bidang otonomi daerah
		Meningkatkan perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat	Optimalisasi fasilitasi perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
	Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum	Mengoptimalkan perumusan kebijakan daerah di bidang hukum	Optimalisasi fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan
			Optimalisasi fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota
			Optimalisasi fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum
	Optimalnya Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Mengoptimalkan Sistem informasi pembinaan perekonomian	Tersedianya penyusunan perencanaan sistem informasi pembinaan perekonomian
			Penguatan fasilitasi dan kerjasama antar lembaga terkait
			Penguatan kualitas SDM pembina dan pengelola BUMD dan BLUD

		Meningkatkan perumusan kebijakan, pengendalian dan pengawasan	Peningkatan implementasi sistem pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah
			Penguatan koordinasi dan penguatan integrasi sistem penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah
	Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa	Mengoptimalkan proses pengadaan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Penguatan pola koordinasi dan implementasi standar operasional prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik
			Penguatan konsolidasi perencanaan pengadaan barang dan jasa
			Peningkatan sarana dan prasarana penunjang LPSE
		Meningkatkan kapasitas SDM, pelaksanaan fungsi advokasi dan kematangan kelembagaan barang dan jasa	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana pendukung layanan secara elektronik
			Optimalisasi fungsi advokasi dan kematangan kelembagaan barang dan jasa
	Optimalnya Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penguatan agen perubahan dan budaya kerja
			Optimalisasi kematangan organisasi
			Penguatan fasilitasi dan koordinasi ketatalaksanaan perangkat daerah
			Optimalisasi manajemen kinerja perangkat daerah
			Penguatan fasilitasi dan koordinasi pelayanan publik
	Optimalnya Pelayanan Pimpinan dan Fasilitasi Administrasi Perangkat Daerah	Penerapan prinsip good governance dan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum	Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan kerumahtanggaan

			Penguatan pengelolaan Administrasi keuangan lingkup Sekretariat
			Penguatan pengelolaan barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah
			Peningkatan pelayanan pimpinan dan perangkat daerah
			Penguatan penyiapan materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam periode 4 (empat) tahun ke depan, maka berikut program kegiatan yang akan dilaksanakan (Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tabel 6.1 Terlampir)



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
a.	Nilai Capaian LPPD	Poin	3.40	3.41	3.45	3.50	3.56	3.56	
b.	Persentase Fasilitasi Penataan Batas Wilayah Administrasi	Persen	75	80	85	90	100	100	
c.	Persentase fasilitasi Kerjasama daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
d.	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
e.	Persentase fasilitasi di bidang otonomi daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
f.	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan di bidang Keagamaan	Persen	100	100	100	100	100	100	
g.	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Pelayanan dan Non Pelayanan Dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	
2.	Biro Hukum								
a.	Persentase Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	
b.	Persentase Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	
c.	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	Persen	100	100	100	100	100	100	

3.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan							
a.	Persentasi Fasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Persen	85	90	90	90	95	95
b.	Persentase Pengelolaan Administrasi Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100
4.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
a.	Persentase Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100	100	100	100
b.	Persentase Ketersediaan SDM	Persen	55	100	100	100	100	100
c.	Penilaian MCP KPK	Persen	71	85	90	95	100	100
d.	Pemenuhan Standarisasi LPSE	Jumlah	12	17	17	17	17	17
5.	Biro Organisasi							
a.	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A
b.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B-	B+	B+	B+	A	A
c.	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	28.1-37	28.1-37	37.1-46	37.1-46	37.1-46	37.1-46
6.	Biro Umum							
a.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan	Indeks	3,2	3,2	3,4	3,6	3,7	3,7
b.	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Lingkup Sekretariat	Persen	98.7	98.80	98.85	98.90	99.00	99.00
c.	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
d.	Persentase Penatausahaan Administrasi Pimpinan dan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
e.	Persentase Penyiapan Materi, Komunikasi dan Keprotokoleran Pimpinan	Persen	100	100	100	100	100	100

**BAB VIII****PENUTUP**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan arah pembangunan yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026. Oleh karenanya seluruh program pembangunan daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026. Dalam Renstra ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Mamuju, 17 Maret 2022

Sekretaris Daerah,

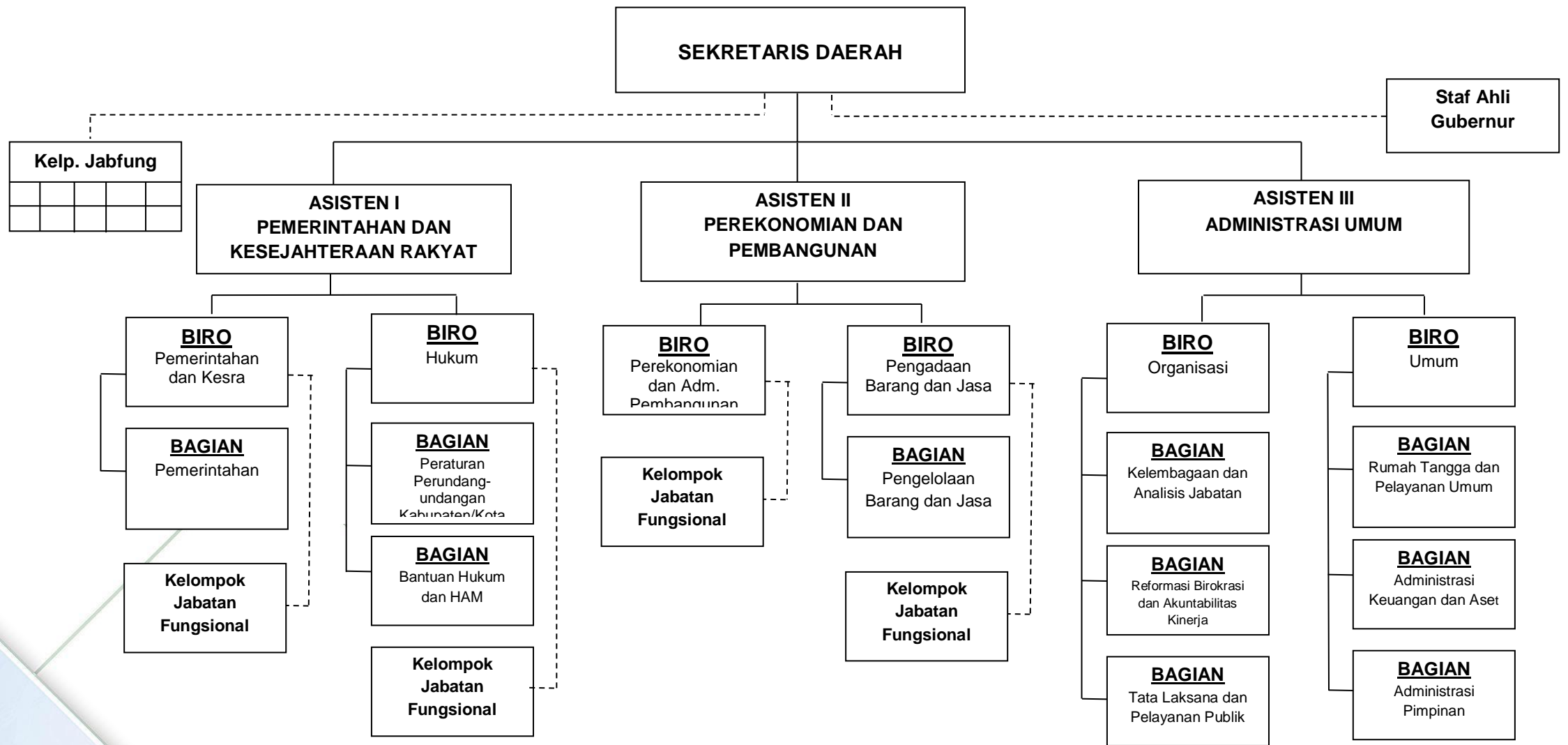


Muhammad Idris, M.Si

Pangkat : Pembina Utama

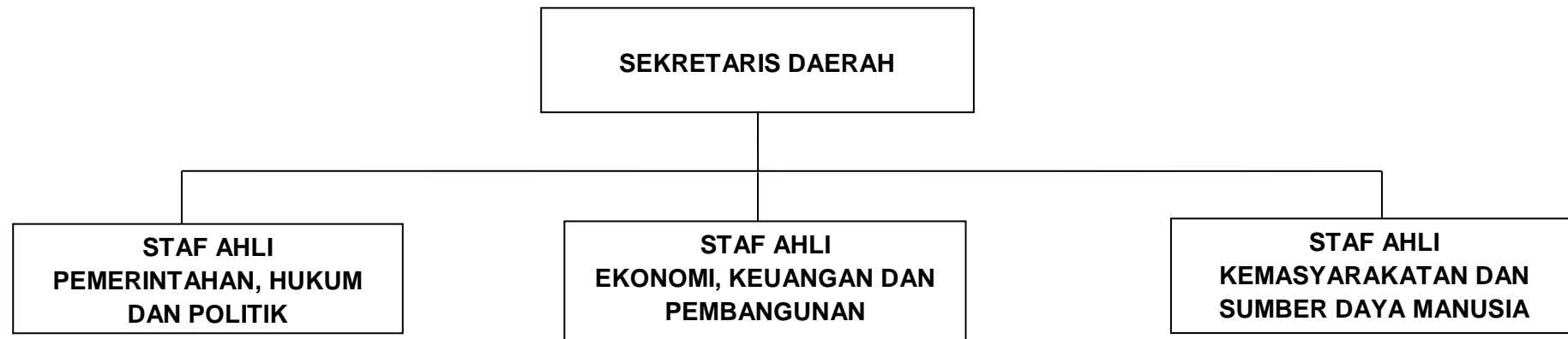
NIP. : 19641115 199303 1 001

Lampiran I. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah





Lampiran II. Struktur Organisasi Staf Ahli Gubernur



No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
SEKRETARIAT DAERAH																		
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																		
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10	15	2.767.990.137,76	20	2.810.215.901,29	25	2.864.664.985,14	30	3.043.954.462,09	30	11.486.825.486,28		
			4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	70	72,6	77.599.260,33	75,5	80.766.192,60	78,7	84.849.873,89	80	98.296.584,67	80	341.511.911,49		
					Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	N/A	100	522.797.781,00	100	532.298.577,79	100	544.549.621,65	100	584.889.753,79	100	2.184.535.734,23		
					Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	52	60	2.097.593.096,43	70	2.127.151.130,90	75	2.165.265.489,60	81	2.290.768.123,62	81	8.680.777.840,56		
					Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	97,00	98,23	70.000.000,00	98,99	70.000.000,00	99,40	70.000.000,00	99,80	70.000.000,00	99,80	280.000.000,00		
			4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	22, 40	23	17.599.260,33	23,3	20.766.192,60	23,5	24.849.873,89	24	38.296.584,67	24	101.511.911,49		
					Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15, 80	17	40.000.000,00	17,5	40.000.000,00	18	40.000.000,00	18,5	40.000.000,00	18,5	160.000.000,00		
					Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	9,2	9,5	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10,5	10.000.000,00	10,7	10.000.000,00	10,7	40.000.000,00		
					Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5,8	6,00	10.000.000,00	6,50	10.000.000,00	7,00	10.000.000,00	7,50	10.000.000,00	7,50	40.000.000,00		
			4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	17.599.260,33	2	20.766.192,60	2	24.849.873,89	3	38.296.584,67	3	101.511.911,49	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	97,00	98,23	30.000.000,00	98,99	30.000.000,00	99,40	30.000.000,00	99,80	30.000.000,00	99,80	120.000.000,00		
					Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	160.000.000,00		
			4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			5 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			6 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00		
			7 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			8 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			9 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	40.000.000,00	Biro PemKesra	Dalam dan Luar Daerah Subbar
			10 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro PemKesra	Dalam dan Luar Daerah Subbar
			4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	N/A	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	400.000.000,00		
			10 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			10 01 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			10 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			10 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	Biro PemKesra	Dalam dan Luar Daerah Subbar
			4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahLingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100	276.799.013,78	100	281.021.590,13	100	286.466.498,51	100	304.395.446,00	100	1.148.682.548,42		
			4 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	2	7.430.000,78	2	7.554.000,13	2	7.640.000,51	2	7.953.900,00	2	30.577.901,42	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	54	74	70.540.000,00	74	71.234.100,00	74	71.540.000,00	74	72.312.000,00	74	285.626.100,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	1	5.430.000,00	1	5.500.000,00	1	5.980.000,00	1	6.500.000,00	1	23.410.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A	1	15.320.000,00	1	15.700.000,00	1	16.100.000,00	1	17.200.000,00	1	64.320.000,00	Biro PemKesra	Mamuju

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	1	11.430.000,00	1	12.000.000,00	1	12.540.900,00	1	13.009.000,00	1	48.979.900,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	1	50.444.000,00	1	51.233.000,00	1	51.501.000,00	1	52.320.000,00	1	205.498.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.05 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	4	20.300.000,00	4	21.310.000,00	4	21.730.000,00	4	22.441.000,00	4	85.781.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	5	95.905.013,00	5	96.490.490,00	5	99.434.598,00	5	112.659.546,00	5	404.489.647,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100	1.837.593.096,43	100	1.867.151.130,90	100	1.905.265.489,60	100	2.030.768.123,62	100	7.640.777.840,56		
			4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	600.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	600.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	1.000.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	800.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	600.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	800.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76	76	437.593.096,43	76	467.151.130,90	76	505.265.489,60	76	630.768.123,62	76	2.040.777.840,56	Biro PemKesra	Mamuju

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.06 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	600.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.06 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	600.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	240.000.000,00		
			4 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.07 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.07 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	40.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	N/A	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	400.000.000,00		
			4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	400.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	N/A	100	245.998.767,22	100	251.276.987,66	100	258.083.123,14	100	280.494.307,79	100	1.035.853.185,81		

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	N/A	1	60.998.767,22	1	66.276.987,66	1	73.083.123,14	1	95.494.307,79	1	295.853.185,81	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	240.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	100.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	200.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.09 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	100.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
			4 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	100.000.000,00	Biro PemKesra	Mamuju
		Optimalnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Persentase Fasilitasi Tugas Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	100	16.739.707.865,67	100	13.432.174.524,45	100	26.342.692.468,70	100	27.714.662.481,29	100	84.229.237.340,11		
			4 01 03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	100	1.352.813.122,29	100	1.126.881.914,20	100	2.263.049.246,39	100	2.545.096.651,83	100	7.287.840.934,71		
			4 01 03 1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia	2	5	359.198.922,29	5	274.765.914,20	5	585.559.000,00	5	693.964.000,00	20	1.913.487.836,49		
			4 01 03 1.01 01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	0	1	100.322.000,00	1	73.765.900,20	1	151.339.000,00	1	152.300.000,00	1	477.726.900,20	Biro PemKesra	Prov. Sulbar
			4 01 03 1.01 02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1	2	131.299.000,00	2	100.000.000,00	2	200.320.000,00	2	211.333.000,00	2	642.952.000,00	Biro PemKesra	Prov. Sulbar
			4 01 03 1.01 03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1	2	127.577.922,29	2	101.000.014,00	2	233.900.000,00	2	330.331.000,00	2	792.808.936,29	Biro PemKesra	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 03 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah yang tersedia	6	7	670.971.000,00	7	582.826.000,00	7	1.091.179.000,00	7	1.195.764.000,00	28	3.540.740.000,00		
			4 01 03 1.02 01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2	2	213.420.000,00	2	254.740.000,00	2	442.300.000,00	2	444.543.000,00	2	1.355.003.000,00	Biro PemKesra	Prov. Sulbar
			4 01 03 1.02 02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1	2	228.321.000,00	2	154.666.000,00	2	293.459.000,00	2	300.321.000,00	2	976.767.000,00	Biro PemKesra	Prov. Sulbar
			4 01 03 1.02 03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3	3	229.230.000,00	3	173.420.000,00	3	355.420.000,00	3	450.900.000,00	3	1.208.970.000,00	Biro PemKesra	Prov. Sulbar
			4 01 03 1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah	1	3	322.643.200,00	3	269.290.000,00	3	586.311.246,39	3	655.368.651,83	12	1.833.613.098,22		
			4 01 03 1.03 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1	1	121.320.000,00	1	112.340.000,00	1	210.000.000,00	1	222.430.000,00	1	666.090.000,00	Biro PemKesra	Prov. Sulbar
			4 01 03 1.03 02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	0	1	100.123.000,00	1	89.320.000,00	1	163.211.000,00	1	200.100.000,00	1	552.754.000,00	Biro PemKesra	Prov. Sulbar
			4 01 03 1.03 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	0	1	101.200.200,00	1	67.630.000,00	1	213.100.246,39	1	232.838.651,83	1	614.769.098,22	Biro PemKesra	Prov. Sulbar
			4 01 04	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	100	15.386.894.743,38	100	12.305.292.610,25	100	24.079.643.222,31	100	25.169.565.829,46	100	76.941.396.405,40		
			4 01 04 1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	100	100	14.092.413.843,00	100	11.135.602.710,00	100	22.595.126.442,00	100	23.597.772.829,00	100	71.420.915.824,00		
			4 01 04 1.01 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	913	450	11.448.513.843,00	300	8.481.302.710,00	750	19.841.066.442,00	1000	20.821.272.829,00	1000	60.592.155.824,00	Biro PemKesra	Prov. Sulbar
			4 01 04 1.01 02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	9	3	2.643.900.000,00	3	2.654.300.000,00	3	2.754.060.000,00	3	2.776.500.000,00	3	10.828.760.000,00	Biro PemKesra	Prov. Sulbar



No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
			4 01 04 1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar	3	3	638.853.900,38	3	467.637.000,25	3	750.009.780,31	3	794.167.000,46	12	2.650.667.681,40						
			4 01 04 1.02 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	1	215.890.000,00	1	232.487.000,00	1	255.432.780,00	1	287.650.000,00	1	991.459.780,00	Biro PemKesra	Prov. Sulbar				
			4 01 04 1.02 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1	1	222.543.900,00	1	24.530.000,00	1	250.250.000,00	1	255.647.000,00	1	752.970.900,00	Biro PemKesra	Prov. Sulbar				
			4 01 04 1.02 03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	1	200.420.000,38	1	210.620.000,25	1	244.327.000,31	1	250.870.000,46	1	906.237.001,40	Biro PemKesra	Prov. Sulbar				
			4 01 04 1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Tersedianya Dokumen Non Pelayanan Dasar	100	100	655.627.000,00	100	702.052.900,00	100	734.507.000,00	100	777.626.000,00	400	2.869.812.900,00						
			4 01 04 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	1	243.216.000,00	1	244.322.900,00	1	245.380.000,00	1	255.439.000,00	1	988.357.900,00	Biro PemKesra	Prov. Sulbar				
			4 01 04 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	1	1	211.511.000,00	1	244.300.000,00	1	255.477.000,00	1	266.743.000,00	1	978.031.000,00	Biro PemKesra	Prov. Sulbar				
			4 01 04 1.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1	1	200.900.000,00	1	213.430.000,00	1	233.650.000,00	1	255.444.000,00	1	903.424.000,00	Biro PemKesra	Prov. Sulbar				
Biro Hukum									3.775.397.895,49			3.636.165.167,06			4.497.343.670,32			4.787.732.180,71		16.696.638.913,58		
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Biro Hukum			Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup Biro Hukum	35	40	2.767.990.137,76	45	2.810.215.901,29	50	2.864.664.985,14	60	3.043.954.462,09	60	11.486.825.486,28						
			4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Hukum	70	75	77.599.260,33	80	80.766.192,60	85	84.849.873,89	90	98.296.584,67	90	341.511.911,49						
					Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Hukum	100	100	522.797.781,00	100	532.298.577,79	100	544.549.621,65	100	584.889.753,79	100	2.184.535.734,23						
					Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Hukum	90	90	2.097.593.096,43	100	2.127.151.130,90	100	2.165.265.489,60	100	2.290.768.123,62	100	8.680.777.840,56						

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Hukum	98,81	98,85	70.000.000,00	98,90	70.000.000,00	98,95	70.000.000,00	98,97	70.000.000,00	98,97	280.000.000,00		
			4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Hukum	24,50	25	17.599.260,33	25,50	20.766.192,60	26	24.849.873,89	26,50	38.296.584,67	26,50	101.511.911,49		
					Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Hukum	18,50	19	40.000.000,00	19,50	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20,50	40.000.000,00	20,50	160.000.000,00		
					Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Hukum	8,50	9	10.000.000,00	9,50	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10,50	10.000.000,00	10,50	40.000.000,00		
					Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Hukum	4	4,50	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5,50	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	40.000.000,00		
			4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	17.599.260,33	2	20.766.192,60	2	24.849.873,89	3	38.296.584,67	3	101.511.911,49	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Biro Hukum	98,81	98,85	30.000.000,00	98,90	30.000.000,00	98,95	30.000.000,00	98,97	30.000.000,00	98,97	120.000.000,00		
					Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Hukum	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	160.000.000,00		
			4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			5 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			6 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			7 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			8 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			9 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			10 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		400.000.000,00		Prov. Sulbar
			10 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			10 01 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			10 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			10 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	276.799.013,78	100	281.021.590,13	100	286.466.498,51	100	304.395.446,00	1.148.682.548,42		Prov. Sulbar	
			4 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	2	7.430.000,78	2	7.554.000,13	2	7.640.000,51	2	7.953.900,00	2	30.577.901,42	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	74	70.540.000,00	74	71.234.100,00	74	71.540.000,00	74	72.312.000,00	74	285.626.100,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	1	5.430.000,00	1	5.500.000,00	1	5.980.000,00	1	6.500.000,00	1	23.410.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	15.320.000,00	1	15.700.000,00	1	16.100.000,00	1	17.200.000,00	1	64.320.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	1	11.430.000,00	1	12.000.000,00	1	12.540.900,00	1	13.009.000,00	1	48.979.900,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	1	50.444.000,00	1	51.233.000,00	1	51.501.000,00	1	52.320.000,00	1	205.498.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	4	20.300.000,00	4	21.310.000,00	4	21.730.000,00	4	22.441.000,00	4	85.781.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	5	95.905.013,00	5	96.490.490,00	5	99.434.598,00	5	112.659.546,00	5	404.489.647,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	1.837.593.096,43	100	1.867.151.130,90	100	1.905.265.489,60	100	2.030.768.123,62	100	7.640.777.840,56		Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	600.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	600.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	1.000.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	800.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	600.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	800.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	75	437.593.096,43	80	467.151.130,90	85	505.265.489,60	90	630.768.123,62	90	2.040.777.840,56	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar dan Luar Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	600.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	600.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	240.000.000,00		
			4 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	40.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	400.000.000,00		
			4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	400.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	245.998.767,22	100	251.276.987,66	100	258.083.123,14	100	280.494.307,79	100	1.035.853.185,81		
			4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	11	60.998.767,22	11	66.276.987,66	11	73.083.123,14	11	95.494.307,79	11	295.853.185,81	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	13	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	240.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	5	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	100.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	200.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	100.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	100.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
		Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum			Persentase Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum	100	100	1.007.407.757,73	100	825.949.265,77	100	1.632.678.685,18	100	1.743.777.718,62	100	5.209.813.427,30		
			4 01 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100	100	1.007.407.757,73	100	825.949.265,77	100	1.632.678.685,18	100	1.743.777.718,62	100	5.209.813.427,30		
			4 01 05 1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	100	100	597.407.757,73	100	500.949.265,77	100	942.678.685,18	100	1.013.777.718,62		3.054.813.427,30		
			4 01 05 1.01 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	35	40	120.000.000,00	35	105.000.000,00	50	220.000.000,00	55	240.000.000,00	55	685.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 05 1.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	500	520	115.000.000,00	470	100.000.000,00	530	190.000.000,00	550	210.000.000,00	550	615.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 05 1.01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	570	600	110.000.000,00	540	95.000.000,00	625	170.000.000,00	655	180.000.000,00	655	555.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 05 1.01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	135	141	252.407.757,73	135	200.949.265,77	153	362.678.685,18	153	383.777.718,62	153	1.199.813.427,30	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 05 1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	100	100	410.000.000,00	100	325.000.000,00	100	690.000.000,00	100	730.000.000,00		2.155.000.000,00		
			4 01 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3	3	305.000.000,00	2	230.000.000,00	4	500.000.000,00	4	520.000.000,00	4	1.555.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
			4 01 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	2	2	105.000.000,00	2	95.000.000,00	4	190.000.000,00	4	210.000.000,00	4	600.000.000,00	Biro Hukum Sekretariat Daerah	Prov. Sulbar
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan							4.078.911.109,48		3.839.110.639,81		4.800.485.227,02		5.015.181.449,58		17.676.638.565,08			
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	28	35	2.774.281.024,43	35	2.816.506.787,96	40	2.870.955.871,81	40	3.043.954.462,31	40	11.448.648.285,70		

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Pembangunan serta Peningkatan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	59,85	62	132.108.620,00	65	132.108.620,00	68	132.108.620,00	71	132.108.620,00	71	528.434.480,00		
					Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	N/A	100	549.798.397,40	100	537.187.906,03	100	571.550.238,05	100	611.890.370,42	100	2.270.426.911,90		
					Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	52	65	2.033.239.672,03	75	2.088.075.926,93	85	2.108.162.678,76	90	2.240.821.136,90	90	8.413.249.553,81		
					Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	94	95	59.134.335,00	95	59.134.335,00	97	59.134.335,00	97	59.134.335,00	97	236.537.339,99		
			4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	22	22	18.872.660,00	22	18.872.660,00	22	18.872.660,00	23,50	18.872.660,00	23,50	75.490.640,00		
					Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	22	22	75.490.640,00	22	75.490.640,00	22	75.490.640,00	23	75.490.640,00	23	301.962.560,00		
					Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	9,40	9,80	18.872.660,00	9,80	18.872.660,00	10	18.872.660,00	11	18.872.660,00	11	75.490.640,00		
					Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	6,50	7,10	18.872.660,00	7,50	18.872.660,00	11	18.872.660,00	13	18.872.660,00	13	75.490.640,00		
			4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	18.872.660,00	2	18.872.660,00	2	18.872.660,00	3	18.872.660,00	9	75.490.640,00	Biro Perencanaan dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	1	18.872.660,00	1	18.872.660,00	1	18.872.660,00	1	18.872.660,00	4	75.490.640,00	Biro Perencanaan dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A	1	18.872.660,00	1	18.872.660,00	1	18.872.660,00	1	18.872.660,00	4	75.490.640,00	Biro Perencanaan dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A	1	18.872.660,00	1	18.872.660,00	1	18.872.660,00	1	18.872.660,00	4	75.490.640,00	Biro Perencanaan dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar



No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	N/A	1	18.872.660,00	1	18.872.660,00	1	18.872.660,00	1	18.872.660,00	4	75.490.640,00	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	18.872.660,00	2	18.872.660,00	2	18.872.660,00	2	18.872.660,00	8	75.490.640,00	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	18.872.660,00	4	18.872.660,00	4	18.872.660,00	4	18.872.660,00	16	75.490.640,00	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	94	95	18.872.660,00	95	18.872.660,00	97	18.872.660,00	97	18.872.660,00	97	75.490.640,00		
					Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	40.261.675,00	100	40.261.675,00	100	40.261.675,00	100	40.261.675,00	100	161.046.699,99		
			4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	25.163.546,67	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			5 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	N/A1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	25.163.546,67	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			6 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	25.163.546,67	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			7 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	25.163.546,67	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			8 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	25.163.546,67	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			9 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	3	21.389.015,00	3	21.389.015,00	3	21.389.015,00	3	21.389.015,00	3	85.556.059,99	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			10 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	6.290.886,67	1	25.163.546,67	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	72.999.383,60	100	95.110.671,76	100	72.999.383,60	100	72.999.383,60	100	314.108.822,56		
			10 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1	18.249.845,90	1	28.777.667,94	1	18.249.845,90	1	18.249.845,90	1	83.527.205,64	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			10 01 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1	18.249.845,90	1	28.777.667,94	1	18.249.845,90	1	18.249.845,90	1	83.527.205,64	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			10 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1	18.249.845,90	1	18.777.667,94	1	18.249.845,90	1	18.249.845,90	1	73.527.205,64	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			10 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1	18.249.845,90	1	18.777.667,94	1	18.249.845,90	1	18.249.845,90	1	73.527.205,64	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	276.799.013,78	100	281.021.590,13	100	286.466.498,51	100	304.395.446,23	100	1.148.682.548,65		
			4 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	1	34.599.876,72	1	35.127.698,77	1	35.808.312,31	1	38.049.430,78	1	143.585.318,58	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	50	34.599.876,72	50	35.127.698,77	50	35.808.312,31	50	38.049.430,78	50	143.585.318,58	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	1	34.599.876,72	1	35.127.698,77	1	35.808.312,31	1	38.049.430,78	1	143.585.318,58	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A	1	34.599.876,72	1	35.127.698,77	1	35.808.312,31	1	38.049.430,78	1	143.585.318,58	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	1	34.599.876,72	1	35.127.698,77	1	35.808.312,31	1	38.049.430,78	1	143.585.318,58	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	2	34.599.876,72	2	35.127.698,77	2	35.808.312,31	2	38.049.430,78	2	143.585.318,58	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar dan Luar Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.05 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	3	34.599.876,72	3	35.127.698,77	3	35.808.312,31	3	38.049.430,78	3	143.585.318,58	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar dan Luar Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	3	34.599.876,72	3	35.127.698,77	3	35.808.312,31	3	38.049.430,78	3	143.585.318,58	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar dan Luar Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	1.775.079.796,94	100	1.804.637.831,41	100	1.842.752.190,11	100	1.968.254.824,13	100	7.350.724.642,59		
			4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm. Pemb	Prov. Sulbar dan Luar Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	1	290.000.000,00	1	290.000.000,00	1	290.000.000,00	1	290.000.000,00	1	1.160.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	162.513.299,49	1	162.513.299,49	1	162.513.299,49	1	162.513.299,49	1	650.053.197,96	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	2	162.513.299,49	2	162.513.299,49	2	162.513.299,49	2	162.513.299,49	2	650.053.197,96	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	1	162.513.299,49	1	162.513.299,49	1	162.513.299,49	1	162.513.299,49	1	650.053.197,96	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	162.513.299,49	1	162.513.299,49	1	162.513.299,49	1	162.513.299,49	1	650.053.197,96	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	30	500.000.000,00	30	529.558.034,47	30	567.672.393,17	40	693.175.027,19	40	2.290.405.454,83	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	1	162.513.299,49	1	162.513.299,49		162.513.299,49	1	162.513.299,49	1	650.053.197,96	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	1	162.513.299,49	1	162.513.299,49		162.513.299,49	1	162.513.299,49	1	650.053.197,96	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	N/A	100	22.647.192,00	100	25.814.124,27	100	29.897.805,56	100	37.053.629,68	100	98.362.890,70		
			4 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	1	3.774.532,00	1	6.941.464,27	1	6.941.464,27	1	6.941.464,27	1	7.549.064,00	Biro Perencanaan dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	1	3.774.532,00	1	3.774.532,00	1	3.774.532,00	1	3.774.532,00	1	15.098.128,00	Biro Perencanaan dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	1	3.774.532,00	1	3.774.532,00	1	7.858.213,29	1	15.014.037,41	1	30.421.314,70	Biro Perencanaan dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	1	3.774.532,00	1	3.774.532,00	1	3.774.532,00	1	3.774.532,00	1	15.098.128,00	Biro Perencanaan dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	3.774.532,00	1	3.774.532,00	1	3.774.532,00	1	3.774.532,00	1	15.098.128,00	Biro Perencanaan dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	3.774.532,00	1	3.774.532,00	1	3.774.532,00	1	3.774.532,00	1	15.098.128,00	Biro Perencanaan dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	100	100	162.513.299,49	100	162.513.299,49	100	162.513.299,49	100	162.513.299,49	100	650.053.197,96		
			4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	162.513.299,49	1	162.513.299,49	1	162.513.299,49	1	162.513.299,49	1	650.053.197,96	Biro Perencanaan dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	100	100	272.999.383,62	100	256.166.315,90	100	285.083.739,54	100	307.494.924,19	100	1.121.744.363,25		
			4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	122.411.184,65	12	422.411.184,65	Biro Perencanaan dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	6	100.000.000,00	6	83.166.932,28	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	383.166.932,28	Biro Perencanaan dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	4	21.499.691,81	4	21.499.691,81	4	21.499.691,81	4	21.499.691,81	4	85.998.767,24	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	4	21.499.691,81	4	21.499.691,81	4	21.499.691,81	4	21.499.691,81	4	85.998.767,24	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	21.084.355,92	4	21.084.355,92	4	72.168.711,84	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	72.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
		Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			Persentase Pelayanan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		100	1.304.630.085,05	100	1.022.603.851,85	100	1.929.529.355,21	100	1.971.226.987,27	100	6.227.990.279,38		
			4 01 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	85	90	604.444.654,64	90	471.971.009,01	90	890.552.010,10	95	909.797.070,59	95	2.876.764.744,34		
			4 01 06 1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Sub Kegiatan	85	90	204.444.654,64	90	131.971.009,01	90	320.552.010,10	95	320.797.070,59	95	977.764.744,34		
			4 01 06 1.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	11	12	104.444.654,64	12	71.971.009,01	14	160.552.010,10	17	160.797.070,59	17	497.764.744,34	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 06 1.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4	6	100.000.000,00	6	60.000.000,00	8	160.000.000,00	12	160.000.000,00	12	480.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 06 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Pengelolaan Kebijakan SDA	100	100	100.000.000,00	100	140.000.000,00	100	170.000.000,00	100	179.000.000,00	100	589.000.000,00		
			4 01 06 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	N/A	10	30.000.000,00	10	50.000.000,00	12	55.000.000,00	12	64.000.000,00	12	199.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 06 1.02 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	N/A	10	30.000.000,00	10	50.000.000,00	12	55.000.000,00	12	55.000.000,00	12	190.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 06 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	10	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	14	60.000.000,00	17	60.000.000,00	17	200.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 06 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan BUMD dan BLUD	100	100	300.000.000,00	100	200.000.000,00	100	400.000.000,00	100	410.000.000,00	100	1.310.000.000,00		
			4 01 06 1.03 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	5	8	100.000.000,00	14	40.000.000,00	14	100.000.000,00	18	100.000.000,00	18	340.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 06 1.03 02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	5	12	50.000.000,00	14	40.000.000,00	14	100.000.000,00	18	100.000.000,00	18	290.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 06 1.03 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	N/A	12	50.000.000,00	12	40.000.000,00	12	50.000.000,00	12	60.000.000,00	12	200.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 06 1.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	5	10	50.000.000,00	12	40.000.000,00	14	100.000.000,00	18	100.000.000,00	18	290.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 06 1.03 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	N/A	12	50.000.000,00	12	40.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	190.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	100	700.185.430,41	100	550.632.842,84	100	1.038.977.345,11	100	1.061.429.916,68	100	3.351.225.535,04		
			4 01 08 1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pemb. Daerah	100	100	400.185.430,41	100	350.632.842,84	100	638.977.345,11	100	631.429.916,68	100	2.021.225.535,04		
			4 01 08 1.01 01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	17	12	130.185.430,41	12	150.632.842,84	12	220.977.345,11	12	220.429.916,68	12	722.225.535,04	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 08 1.01 02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	17	12	130.000.000,00	12	100.000.000,00	12	210.000.000,00	12	210.000.000,00	12	650.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 08 1.01 03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	17	13	140.000.000,00	13	100.000.000,00	13	208.000.000,00	13	201.000.000,00	13	649.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 08 1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	100	100	300.000.000,00	100	200.000.000,00	100	400.000.000,00	100	430.000.000,00	100	1.330.000.000,00		
			4 01 08 1.02 01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	17	13	120.000.000,00	13	70.000.000,00	13	140.000.000,00	13	150.000.000,00	13	480.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 08 1.02 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan	17	13	110.000.000,00	13	60.000.000,00	13	140.000.000,00	13	150.000.000,00	13	460.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
			4 01 08 1.02 03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Teknis Pembangunan Daerah	17	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	120.000.000,00	12	130.000.000,00	12	390.000.000,00	Biro Perekonomian dan Adm.Pemb.	Prov. Sulbar
Biro Pengadaan Barang dan Jasa								3.291.775.279,49		3.143.128.970,97		3.212.372.004,76		3.686.812.472,67		13.334.088.727,89		
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa			Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10	15	2.767.990.137,75	20	2.810.215.901,29	25	2.864.664.985,14	30	3.043.954.462,32	30	11.486.825.486,50		
			4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	50	55	375.000.000,00	60	440.000.000,00	70	482.000.000,00	75	510.000.000,00	75	1.807.000.000,00		
					Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	100	850.000.000,00	100	880.000.000,00	100	880.000.000,00	100	900.000.000,00	100	3.510.000.000,00		
					Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	50	60	1.415.990.137,75	70	1.355.215.901,29	75	1.357.664.985,14	81	1.463.954.462,32	81	5.592.825.486,50		
					Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	94,4	94,5	127.000.000,00	96,37	135.000.000,00	97,25	145.000.000,00	98,53	170.000.000,00	98,53	577.000.000,00		
			4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	21	22	75.000.000,00	22,50	80.000.000,00	22,80	86.000.000,00	23	90.000.000,00	23	331.000.000,00		
					Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	21	22	200.000.000,00	22,50	240.000.000,00	22,80	264.000.000,00	23	280.000.000,00	23	984.000.000,00		
					Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	9	9,50	50.000.000,00	9,5	60.000.000,00	9,50	66.000.000,00	10	70.000.000,00	10	246.000.000,00		

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6	6,50	50.000.000,00	7	60.000.000,00	9	66.000.000,00	10	70.000.000,00	10	246.000.000,00		
			4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	75.000.000,00	2	80.000.000,00	2	86.000.000,00	3	90.000.000,00	3	331.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	66.000.000,00	1	70.000.000,00	1	246.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	66.000.000,00	1	70.000.000,00	1	246.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	66.000.000,00	1	70.000.000,00	1	246.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	66.000.000,00	1	70.000.000,00	1	246.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2	66.000.000,00	2	70.000.000,00	2	246.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	66.000.000,00	4	70.000.000,00	4	246.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	95	96,00	50.000.000,00	97,00	55.000.000,00	98,00	60.000.000,00	99,00	70.000.000,00	99,00	235.000.000,00		
					Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	77.000.000,00	100	80.000.000,00	100	85.000.000,00	100	100.000.000,00	100	342.000.000,00		
			7 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	235.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			9 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	2	77.000.000,00	2	80.000.000,00	2	85.000.000,00	2	100.000.000,00	2	342.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar



No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	100	350.000.000,00	100	380.000.000,00	100	380.000.000,00	100	400.000.000,00	100	1.510.000.000,00		
			4 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	20	250.000.000,00	20	280.000.000,00	20	280.000.000,00	20	300.000.000,00	20	1.110.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	650.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	850.000.000,00	100	3.000.000.000,00		
			4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	30	150.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	250.000.000,00	30	800.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	200.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40	40	150.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	250.000.000,00	40	800.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	40	300.000.000,00	40	300.000.000,00	40	300.000.000,00	40	300.000.000,00	40	1.200.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	715.000.000,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	100	2.365.000.000,00		
			4 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	4	400.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	700.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	20	125.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	725.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	15	190.000.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00	15	940.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	50.990.137,75	100	55.215.901,29	100	57.664.985,14	100	63.954.462,32	100	227.825.486,50		
			4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	50.990.137,75	4	55.215.901,29	4	57.664.985,14	4	63.954.462,32	4	227.825.486,50	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	2.000.000.000,00		
			4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	1.000.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	9	250.000.000,00	11	250.000.000,00	13	250.000.000,00	15	250.000.000,00	15	1.000.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
		Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa			Persentase Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa		100	523.785.141,74	100	332.913.069,68	100	347.707.019,62	100	642.858.010,35	100	1.847.263.241,39		
			4 01 07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	70,9	73,03	523.785.141,74	75,95	332.913.069,68	79,75	347.707.019,62	84,53	642.858.010,35	84,53	1.847.263.241,39		
			4 01 07 1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur	100	100	174.595.047,74	100	110.971.023,68	100	115.903.013,62	100	214.290.010,35	100	615.759.095,39		
			4 01 07 1.01 01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2	2	58.198.349,74	2	36.990.341,68	2	38.635.011,62	2	71.434.010,35	2	205.257.713,39	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	58.198.349,00	4	36.990.341,00	4	38.634.001,00	4	71.428.000,00	4	205.250.691,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 07 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	58.198.349,00	4	36.990.341,00	4	38.634.001,00	4	71.428.000,00	4	205.250.691,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar
			4 01 07 1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	100	174.595.047,00	100	110.971.023,00	100	115.902.003,00	100	214.284.000,00	100	615.752.073,00		

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
			4 01 07 1.02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4	4	58.198.349,00	4	36.990.341,00	4	38.634.001,00	4	71.428.000,00	4	205.250.691,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar	
			4 01 07 1.02 02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	58.198.349,00	4	36.990.341,00	4	38.634.001,00	4	71.428.000,00	4	205.250.691,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar	
			4 01 07 1.02 03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	58.198.349,00	4	36.990.341,00	4	38.634.001,00	4	71.428.000,00	4	205.250.691,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar	
			4 01 07 1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100	100	174.595.047,00	100	110.971.023,00	100	115.902.003,00	100	214.284.000,00	100	615.752.073,00			
			4 01 07 1.03 01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30	30	58.198.349,00	30	36.990.341,00	30	38.634.001,00	30	71.428.000,00	30	205.250.691,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar	
			4 01 07 1.03 02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	58.198.349,00	3	36.990.341,00	3	38.634.001,00	3	71.428.000,00	3	205.250.691,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar	
			4 01 07 1.03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	58.198.349,00	3	36.990.341,00	3	38.634.001,00	3	71.428.000,00	3	205.250.691,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Sulbar	
Biro Organisasi									3.939.451.876,96		4.275.721.562,09		4.598.615.626,74		6.146.790.424,71		18.960.579.490,51		
	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Biro Organisasi			Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup Biro Organisasi	35	45	2.767.990.137,76	50	2.810.215.901,29	60	2.864.664.985,14	70	3.043.954.462,31	70	11.486.825.486,51			
			4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Organisasi	83	86	72.659.741,00	89	73.768.175,60	92	75.197.464,89	95	79.903.807,67	95	301.529.189,16			
					Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Organisasi	N/A	100	522.797.781,00	100	532.298.577,79	100	544.549.621,65	100	584.889.754,02	100	2.184.535.734,46			
					Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Organisasi	50	60	2.099.872.874,43	75	2.130.380.984,90	80	2.169.720.447,60	90	2.299.257.097,62	90	8.699.231.404,56			
					Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Organisasi	96,00	97,00	72.659.741,33	97,00	73.768.163,00	98,00	75.197.451,00	98,00	79.903.803,00	98,00	301.529.158,33			

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	27	28	10.379.963,00	28	10.538.321,60	28,50	10.742.506,89	29	11.414.833,67	29	43.075.625,16		
					Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Organisasi	20	22	41.519.852,00	24	42.153.236,00	26	42.969.972,00	28	45.659.316,00	28	172.302.376,00		
					Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	14	14,50	10.379.963,00	14,70	10.538.309,00	14,90	10.742.493,00	15	11.414.829,00	15	43.075.594,00		
					Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Organisasi	10	14	10.379.963,00	18	10.538.309,00	22	10.742.493,00	24	11.414.829,00	24	43.075.594,00		
			4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	10.379.963,00	2	10.538.321,60	2	10.742.506,89	3	11.414.833,67	3	43.075.625,16	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	1	10.379.963,00	1	10.538.309,00	1	10.742.493,00	1	11.414.829,00	1	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A	1	10.379.963,00	1	10.538.309,00	1	10.742.493,00	1	11.414.829,00	1	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A	1	10.379.963,00	1	10.538.309,00	1	10.742.493,00	1	11.414.829,00	1	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	N/A	1	10.379.963,00	1	10.538.309,00	1	10.742.493,00	1	11.414.829,00	1	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	10.379.963,00	2	10.538.309,00	2	10.742.493,00	2	11.414.829,00	2	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	10.379.963,00	4	10.538.309,00	4	10.742.493,00	4	11.414.829,00	4	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Organisasi	96	97	31.139.889,33	97	31.614.927,00	98	32.227.479,00	98	34.244.487,00	98	129.226.782,33		

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Organisasi	100	100	41.519.852,00	100	42.153.236,00	100	42.969.972,00	100	45.659.316,00	100	172.302.376,00		
			4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	1	10.379.963,33	1	10.538.309,00	1	10.742.493,00	1	11.414.829,00	1	43.075.594,33	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			5 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	1	10.379.963,00	1	10.538.309,00	1	10.742.493,00	1	11.414.829,00	1	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			6 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A	1	10.379.963,00	1	10.538.309,00	1	10.742.493,00	1	11.414.829,00	1	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			7 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	1	10.379.963,00	1	10.538.309,00	1	10.742.493,00	1	11.414.829,00	1	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			8 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	N/A	1	10.379.963,00	1	10.538.309,00	1	10.742.493,00	1	11.414.829,00	1	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			9 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	N/A	3	10.379.963,00	3	10.538.309,00	3	10.742.493,00	3	11.414.829,00	3	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			10 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	1	10.379.963,00	1	10.538.309,00	1	10.742.493,00	1	11.414.829,00	1	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah Lingkup Biro Organisasi	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	400.000.000,00		
			10 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			10 01 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			10 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			10 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Organisasi	100	100	276.799.013,78	100	281.021.590,13	100	286.466.498,51	100	304.395.446,23	100	1.148.682.548,65		
			4 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	2	34.599.881,78	2	35.127.704,13	2	35.808.314,51	2	38.049.436,23	2	143.585.336,65	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	53	34.599.876,00	53	35.127.698,00	53	35.808.312,00	53	38.049.430,00	53	143.585.316,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	1	34.599.876,00	1	35.127.698,00	1	35.808.312,00	1	38.049.430,00	1	143.585.316,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A	1	34.599.876,00	1	35.127.698,00	1	35.808.312,00	1	38.049.430,00	1	143.585.316,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	3	34.599.876,00	3	35.127.698,00	3	35.808.312,00	3	38.049.430,00	3	143.585.316,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	12	34.599.876,00	12	35.127.698,00	14	35.808.312,00	14	38.049.430,00	14	143.585.316,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	4	34.599.876,00	4	35.127.698,00	4	35.808.312,00	4	38.049.430,00	4	143.585.316,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	5	34.599.876,00	5	35.127.698,00	5	35.808.312,00	5	38.049.430,00	5	143.585.316,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Organisasi	100	100	1.637.593.096,43	100	1.667.151.130,90	100	1.705.265.489,60	100	1.830.768.123,62	100	6.840.777.840,56		
			4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	600.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	400.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	400.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300	300	200.000.000,00	300	200.000.000,00	300	200.000.000,00	300	200.000.000,00	300	800.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80	80	150.000.000,00	80	150.000.000,00	80	150.000.000,00	80	150.000.000,00	80	600.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	400.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60	60	200.000.000,00	60	200.000.000,00	60	200.000.000,00	60	200.000.000,00	60	800.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	70	437.593.096,43	70	467.151.130,90	70	505.265.489,60	70	630.768.123,62	70	2.040.777.840,56	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	400.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	400.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100	100	62.279.778,00	100	63.229.854,00	100	64.454.958,00	100	68.488.974,00	100	258.453.564,00		
			4 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	6	10.379.963,00	6	10.538.309,00	8	10.742.493,00	8	11.414.829,00	8	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	2	10.379.963,00	2	10.538.309,00	2	10.742.493,00	2	11.414.829,00	2	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	15	10.379.963,00	15	10.538.309,00	15	10.742.493,00	15	11.414.829,00	15	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	2	10.379.963,00	2	10.538.309,00	2	10.742.493,00	2	11.414.829,00	2	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	2	10.379.963,00	2	10.538.309,00	2	10.742.493,00	2	11.414.829,00	2	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	2	10.379.963,00	2	10.538.309,00	2	10.742.493,00	2	11.414.829,00	2	43.075.594,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Organisasi	100	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	1.200.000.000,00		
			4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	400.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	400.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	400.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Lingkup Biro Organisasi	100	100	245.998.767,22	100	251.276.987,66	100	258.083.123,14	100	280.494.307,79	100	1.035.853.185,81		
			4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	N/A	1	60.998.767,22	1	66.276.987,66	1	73.083.123,14	1	95.494.307,79	1	295.853.185,81	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	240.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	100.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar



No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	200.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	100.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	100.000.000,00	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
		Optimalnya Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Persentase Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	100	100	1.171.461.739,20	100	1.465.505.660,80	100	1.733.950.641,60	100	3.102.835.962,40	100	7.473.754.004,00		
			4 01 02	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 10 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP	83,33	100	777.163.587,00	100	960.941.038,00	100	1.128.719.151,00	100	1.984.272.476,50	100	4.851.096.252,50		
					Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Mnimal B+	-	33,33	394.298.152,20	33,33	504.564.622,80	66,67	605.231.490,60	100	1.118.563.485,90	100	2.622.657.751,50		
			4 01 02 1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada	75	80	116.432.717,40	85	153.188.207,60	90	186.743.830,20	100	357.854.495,30	100	814.219.250,50		
					Indeks Kematangan Organisasi	28.1-37	28.1-37	277.865.434,80	37.1-46	351.376.415,20	37.1-46	418.487.660,40	37.1-46	760.708.990,60	37.1-46	1.808.438.501,00		
			4 01 02 1.01 01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan provinsi	1	1	136.432.717,40	1	173.188.207,60	1	206.743.830,20	1	377.854.495,30	1	894.219.250,50	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 02 1.01 02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota	6	6	141.432.717,40	6	178.188.207,60	6	211.743.830,20	6	382.854.495,30	6	914.219.250,50	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 02 1.01 03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	3	3	116.432.717,40	3	153.188.207,60	3	186.743.830,20	3	357.854.495,30	3	814.219.250,50	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 02 1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada	35	50	307.865.434,80	65	381.376.415,20	80	448.487.660,40	100	790.708.990,60	100	1.928.438.501,00		

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Nilai SAKIP Pemprov.	67	70	469.298.152,20	74	579.564.622,80	78	680.231.490,60	81	1.193.563.485,90	83	2.922.657.751,50		
			4 01 02 1.02 01	Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	8	8	181.432.717,40	8	218.188.207,60	8	251.743.830,20	8	422.854.495,30	8	1.074.219.250,50	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 02 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	7	7	176.432.717,40	7	213.188.207,60	7	246.743.830,20	7	417.854.495,30	7	1.054.219.250,50	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 02 1.02 03	Evaluasi pelaksanaan budaya kerja	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	1	1	106.432.717,40	1	143.188.207,60	1	176.743.830,20	1	347.854.495,30	1	774.219.250,50	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 02 1.02 04	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintahan	20	25	126.432.717,40	30	163.188.207,60	35	196.743.830,20	42	367.854.495,30	42	854.219.250,50	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
			4 01 02 1.02 05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	3	3	186.432.717,40	3	223.188.207,60	3	256.743.830,20	3	427.854.495,30	3	1.094.219.250,50	Biro Organisasi	Prov. Sulbar
Biro Umum								100.586.301.394,31		95.133.505.863,25		159.003.721.270,88		181.662.389.486,25		536.385.918.014,69		
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Biro Umum			Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup Biro Umum	28,56	35	41.519.852.065,32	40	42.153.238.519,31	60	42.969.974.777,13	65	45.659.316.934,81	65	172.302.382.296,57		
			4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Umum	64,88	67,40	87.996.301,66	73,50	89.830.962,98	85,80	94.249.369,43	89,50	106.482.923,37	89,50	378.559.557,44		
					Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Umum	N/A	100	2.597.758.743,29	100	2.637.387.623,35	100	2.688.488.088,56	100	2.856.751.262,89	100	10.780.385.718,09		
					Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Umum	54	60	10.604.195.642,83	65	10.765.860.920,10	70	10.973.587.467,72	80	11.658.538.125,34	80	44.002.182.155,99		
					Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Umum	96,00	97,00	28.229.901.377,54	97,00	28.660.159.012,88	98,00	29.213.649.851,42	98,00	31.037.544.623,21	98,00	117.141.254.865,05		
			4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Umum	24,6	25	22.996.301,66	25,5	23.280.962,98	26	24.399.369,43	26,5	27.732.923,37	26,5	98.409.557,44		

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Umum	20,5	21	32.000.000,00	21,5	33.150.000,00	25	35.450.000,00	27	38.350.000,00	27	138.950.000,00		
					Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Umum	12,3	12,5	13.000.000,00	12,7	13.100.000,00	12,8	13.300.000,00	13	15.300.000,00	13	54.700.000,00		
					Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Umum	10	15	20.000.000,00	20	20.300.000,00	22	21.100.000,00	23	25.100.000,00	23	86.500.000,00		
			4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	7	22.996.301,66	7	23.280.962,98	7	24.399.369,43	7	27.732.923,37	7	98.409.557,44	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Biro Umum	1	1	9.000.000,00	1	9.350.000,00	1	9.850.000,00	1	10.850.000,00	1	39.050.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Biro Umum	1	1	12.000.000,00	1	12.300.000,00	1	12.900.000,00	1	13.900.000,00	1	51.100.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-Biro Umum	1	1	4.000.000,00	1	4.200.000,00	1	4.800.000,00	1	5.200.000,00	1	18.200.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Biro Umum	1	1	7.000.000,00	1	7.300.000,00	1	7.900.000,00	1	8.400.000,00	1	30.600.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro	2	2	13.000.000,00	2	13.100.000,00	2	13.300.000,00	2	15.300.000,00	2	54.700.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	7	20.000.000,00	7	20.300.000,00	7	21.100.000,00	7	25.100.000,00	7	86.500.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum	100	100	27.979.901.377,54	100	28.406.459.012,88	100	28.955.449.851,42	100	30.767.444.623,21	100	116.109.254.865,05		
					Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum	100	100	100.000.000,00	100	101.700.000,00	100	104.200.000,00	100	109.100.000,00	100	415.000.000,00		

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	300	27.679.901.377,54	300	28.102.159.012,88	300	28.646.649.851,42	300	30.439.544.623,21	300	114.868.254.865,05	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	3	105.000.000,00	3	106.000.000,00	3	107.500.000,00	3	114.500.000,00	3	433.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Biro Umum	2400	2400	155.000.000,00	2450	157.000.000,00	2500	159.500.000,00	2600	169.500.000,00	2600	641.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Biro Umum	1	1	40.000.000,00	1	41.300.000,00	1	41.800.000,00	1	43.900.000,00	1	167.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Umum	12	2	15.000.000,00	2	15.200.000,00	2	15.600.000,00	2	16.600.000,00	2	62.400.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	5	50.000.000,00	5	51.000.000,00	5	52.400.000,00	5	54.800.000,00	5	208.200.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Biro Umum dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	16	16	25.000.000,00	16	25.400.000,00	16	26.000.000,00	16	27.400.000,00	16	103.800.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	10.000.000,00	2	10.100.000,00	2	10.200.000,00	2	10.300.000,00	2	40.600.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum	100,00	100	516.230.160,69	100	524.105.265,59	100	534.260.019,73	100	567.697.507,22	100	2.142.292.953,23	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Biro Umum	30	30	90.000.000,00	30	91.000.000,00	30	92.300.000,00	30	96.300.000,00	30	369.600.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Biro Umum	4	4	200.000.000,00	4	204.000.000,00	4	208.754.000,00	4	227.754.000,00	4	840.508.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Biro Umum	3	4	30.000.000,00	4	30.500.000,00	4	31.200.000,00	4	32.300.000,00	4	124.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Biro Umum	12	6	51.230.160,69	6	51.705.265,59	6	52.506.019,73	6	54.843.507,22	6	210.284.953,23	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	12	72	30.000.000,00	72	30.400.000,00	72	31.200.000,00	72	32.200.000,00	72	123.800.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	1	2	75.000.000,00	2	76.000.000,00	2	77.000.000,00	2	82.000.000,00	2	310.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Umum	1	10	40.000.000,00	11	40.500.000,00	12	41.300.000,00	12	42.300.000,00	12	164.100.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	N/A	100	150.000.000,00	100	152.000.000,00	100	154.000.000,00	100	161.000.000,00	100	617.000.000,00		
			4 01 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	N/A	1	40.000.000,00	1	40.500.000,00	1	41.100.000,00	1	43.100.000,00	1	164.700.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	N/A	2	60.000.000,00	2	60.800.000,00	2	61.800.000,00	2	64.300.000,00	2	246.900.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	N/A	1	30.000.000,00	1	30.400.000,00	1	30.600.000,00	1	32.100.000,00	1	123.100.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	N/A	2	20.000.000,00	2	20.300.000,00	2	20.500.000,00	2	21.500.000,00	2	82.300.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Umum	100	100	1.383.995.067,88	100	1.405.107.950,64	100	1.432.332.492,57	100	1.521.977.231,16	100	5.743.412.742,25		
			4 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4	7	214.995.067,88	7	219.107.950,64	8	220.572.492,57	8	228.617.231,16	8	883.292.742,25	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	10	185.000.000,00	10	187.000.000,00	10	193.000.000,00	10	213.000.000,00	10	778.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	27	1	150.000.000,00	1	154.000.000,00	1	154.000.000,00	1	164.000.000,00	1	622.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75	7	125.000.000,00	7	127.000.000,00	7	133.060.000,00	7	143.060.000,00	7	528.120.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	10	85.000.000,00	10	88.000.000,00	10	92.000.000,00	10	102.000.000,00	10	367.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	20	134.000.000,00	20	135.000.000,00	20	139.700.000,00	20	145.300.000,00	20	554.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	50	490.000.000,00	50	495.000.000,00	50	500.000.000,00	50	526.000.000,00	50	2.011.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum	100	100	6.559.721.427,96	100	6.659.790.153,67	100	6.788.826.315,04	100	7.213.715.482,53	100	27.222.053.379,20		
			4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	4	920.000.000,00	4	940.000.000,00	4	960.000.000,00	4	980.000.000,00	4	3.800.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	4	270.000.000,00	4	277.000.000,00	4	283.000.000,00	4	293.000.000,00	4	1.123.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	4	155.000.000,00	4	158.000.000,00	4	162.000.000,00	4	168.000.000,00	4	643.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	2	2.764.721.427,96	2	2.787.790.153,67	2	2.840.826.315,04	2	3.183.715.482,53	2	11.577.053.379,20	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16	2	280.000.000,00	2	290.000.000,00	2	300.000.000,00	2	310.000.000,00	2	1.180.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	900.000.000,00	12	910.000.000,00	12	920.000.000,00	12	930.000.000,00	12	3.660.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	1.150.000.000,00	12	1.170.000.000,00	12	1.190.000.000,00	12	1.210.000.000,00	12	4.720.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.06 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	120.000.000,00	1	127.000.000,00	1	133.000.000,00	1	139.000.000,00	1	519.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	400.000.000,00	100	406.000.000,00	100	413.000.000,00	100	437.000.000,00	100	1.656.000.000,00		
			4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	3	200.000.000,00	4	203.000.000,00	5	207.000.000,00	6	219.000.000,00	6	829.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	5	40.000.000,00	6	40.300.000,00	7	40.600.000,00	8	42.100.000,00	8	163.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	10	100.000.000,00	12	102.000.000,00	12	104.000.000,00	14	112.000.000,00	14	418.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.07 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70	70	60.000.000,00	70	60.700.000,00	70	61.400.000,00	70	63.900.000,00	70	246.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3.128.244.054,18	100	3.175.965.500,84	100	3.237.501.132,95	100	3.440.125.135,59	100	12.981.835.823,56		
			4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	300.000.000,00	12	310.000.000,00	12	320.500.000,00	12	370.500.000,00	12	1.301.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	1.700.000.000,00	12	1.720.000.000,00	12	1.745.000.000,00	12	1.805.000.000,00	12	6.970.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1.128.244.054,18	1	1.145.965.500,84	1	1.172.001.132,95	1	1.264.625.135,59	1	4.710.835.823,56	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	1.213.763.675,41	100	1.232.279.672,71	100	1.256.155.595,99	100	1.334.774.031,73	100	5.036.972.975,84		

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	20	200.000.000,00	20	204.000.000,00	20	208.000.000,00	20	212.000.000,00	20	824.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120	120	400.000.000,00	120	406.000.000,00	120	412.000.000,00	120	428.000.000,00	120	1.646.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	170	100.000.000,00	170	102.000.000,00	170	106.000.000,00	170	116.000.000,00	170	424.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	513.763.675,41	12	520.279.672,71	12	530.155.595,99	12	578.774.031,73	12	2.142.972.975,84	Biro Umum	Prov. Sulbar
				Optimalnya Pelayanan Pimpinan dan Fasilitasi Administrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan pimpinan dan tamu pimpinan	90	95	59.066.449.328,99	95	52.980.267.343,94	100	116.033.746.493,75	100	136.003.072.551,44	100	364.083.535.718,12		
			4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum	100	100	59.066.449.328,99	100	52.980.267.343,94	100	116.033.746.493,75	100	136.003.072.551,44	100	364.083.535.718,12		
			4 01 01 1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	1.600.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.900.000.000,00	100	2.200.000.000,00	100	7.200.000.000,00		
			4 01 01 1.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	300.000.000,00	2	270.000.000,00	2	350.000.000,00	2	450.000.000,00	2	1.370.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	8	100.000.000,00	8	80.000.000,00	9	180.000.000,00	10	230.000.000,00	10	590.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	1.200.000.000,00	2	1.150.000.000,00	2	1.370.000.000,00	2	1.520.000.000,00	2	5.240.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	100	30.466.449.328,99	100	26.980.267.343,94	100	63.633.746.493,75	100	73.303.072.551,44	100	194.383.535.718,12		
			4 01 01 1.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5	5	9.700.000.000,00	5	8.700.000.000,00	5	22.700.000.000,00	5	26.200.000.000,00	5	67.300.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar



No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			4 01 01 1.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5	5	6.666.449.328,99	5	6.180.267.343,94	5	12.833.746.493,75	5	14.003.072.551,44	5	39.683.535.718,12	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	10	10	14.100.000.000,00	10	12.100.000.000,00	10	28.100.000.000,00	10	33.100.000.000,00	10	87.400.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	100	20.000.000.000,00	100	18.000.000.000,00	100	38.000.000.000,00	100	43.000.000.000,00	100	119.000.000.000,00		
			4 01 01 1.13 01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	200	200	3.000.000.000,00	210	2.400.000.000,00	215	6.400.000.000,00	220	6.900.000.000,00	220	18.700.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.13 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	900	900	13.000.000.000,00	950	12.000.000.000,00	1000	22.000.000.000,00	1010	25.500.000.000,00	1010	72.500.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.13 03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1400	1400	4.000.000.000,00	1500	3.600.000.000,00	1600	9.600.000.000,00	1700	10.600.000.000,00	1700	27.800.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan	100	100	7.000.000.000,00	100	6.500.000.000,00	100	12.500.000.000,00	100	17.500.000.000,00	100	43.500.000.000,00		
			4 01 01 1.14 01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1000	1000	2.000.000.000,00	1100	1.800.000.000,00	1200	2.800.000.000,00	1300	3.800.000.000,00	1300	10.400.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.14 02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	12	2.000.000.000,00	12	1.850.000.000,00	12	3.000.000.000,00	12	4.200.000.000,00	12	11.050.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar
			4 01 01 1.14 03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	900	900	3.000.000.000,00	1000	2.850.000.000,00	1070	6.700.000.000,00	1100	9.500.000.000,00	1100	22.050.000.000,00	Biro Umum	Prov. Sulbar